

**PERSEPSI MASYARAKAT BANGKALAN TERHADAP KEINGINAN
ELIT POLITIK DALAM MEWUJUDKAN PEMEKARAN MADURA
SEBAGAI PROVINSI**

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Filsafat Politik Islam



Oleh:

BADRUTTAMAM

NIM: E04212018

**PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

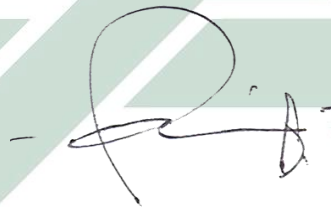
Nama : Badruttamam

NIM : E04212018

Judul : **Persepsi Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 23 Januari 2018
Pembimbing



Holilah, S.Ag, M.Si
NIP. 197610182008012008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Badruttamam ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi.

Surabaya, 01 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Muhid, M.Ag
NIP. 196310021993031002

Tim Penguji:

Ketua,

Holilah, S.Ag, M.Si
Nip.197610182008012008

Sekretaris,

Laili Bariroh, M.Si
Nip. 197711032009122002

Penguji I,

Zaky Ismail, M.Si
Nip. 198212302011011007

Penguji II.

M. Anas Fakhruddin, S.Th.I, M.Si
Nip. 198202102009011007

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Badruttamam
NIM : E04212018
Jurusan : Filsafat Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Judul : **Persepsi Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi**

Dengan sungguh sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya, jika ternyata kemudian hari skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar sarjana yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 23 Januari 2018

Yang menyatakan,




Badruttamam
E04212018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsbv.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Badruttamam
NIM : E04212018
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/ Ilmu Alquran dan Tafsir
E-mail address : badruttamam689@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

Persepsi Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

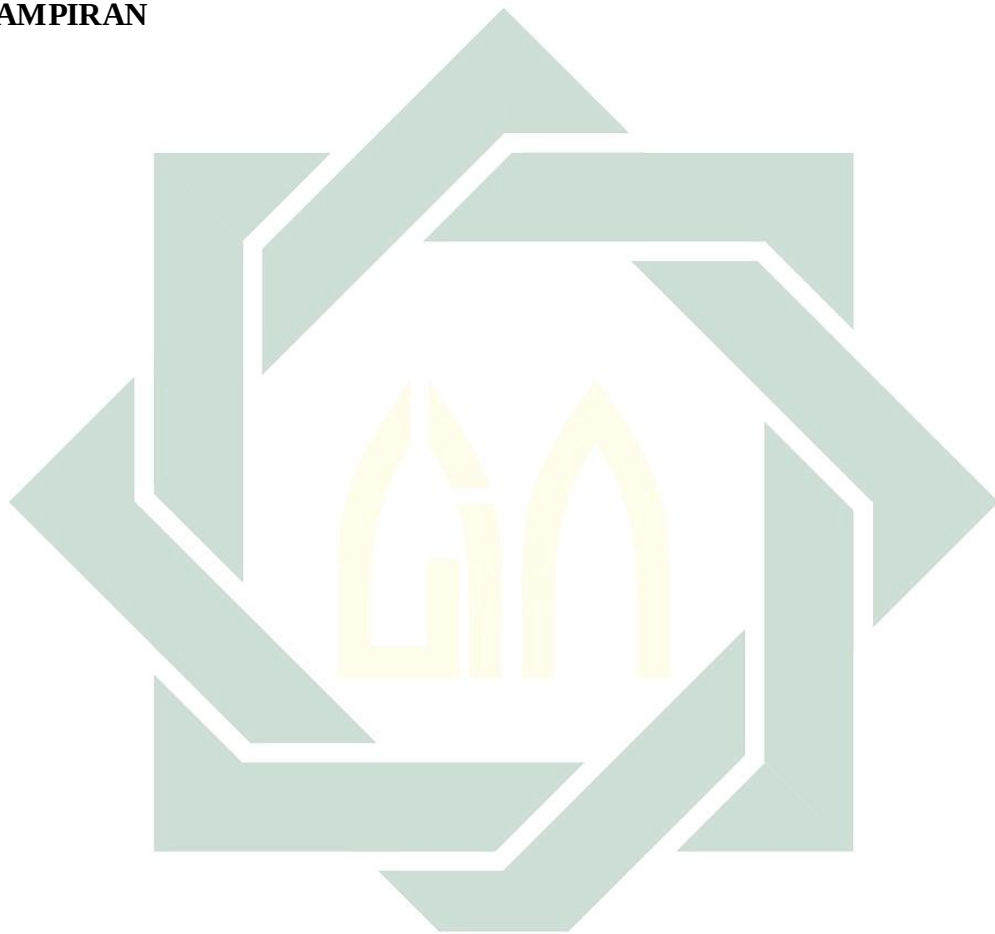
BADRUTTAMAM

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER DEPAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN COVER DALAM JUDUL SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR..	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Definisi Oprasional.....	13
G. Variabel Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II KAJIAN TEORI	 17
A. Persepsi Masyarakat	17
B. Elit Politik (Elit Politik Madura)	21
C. Pemekaran Wilayah/daerah	24
D. Otonomi Daerah	40
E. Desentralisasi	48
F. Penelitian Terdahulu	49

	11
G. Kerangka Berfikir	51
H. Hipotesis	52
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	53
B. Objek Penelitian	54
C. Sumber dan Jenis data	58
D. Teknik Pengumpulan data	60
E. Teknik Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN	63
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
1. Deskripsi Kabupaten Bangkalan	63
2. Sosial Politik Masyarakat Bangkalan	66
3. Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat Bangkalan..	68
B. Karakteristik Responden	70
C. Penyajian Data penelitian	73
1. Data tentang Pengetahuan Masyarakat.....	74
2. Data tentang pemahaman Masyarakat	85
3. Data tentang Penilaian Masyarakat	92
4. Data tentang Persepsi Masyarakat	98
BAB V PERSEPSI MASYARAKAT BANGKALAN TERHADAP KEINGINAN ELIT POLITIK DALAM MEWUJUDKAN PEMEKARAN MADURA SEBAGAI PROVINSI	108
A. Pengetahuan Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi	114
B. Pemahaman Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi	115

C. Penilaian Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi.....	117
BAB VI PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

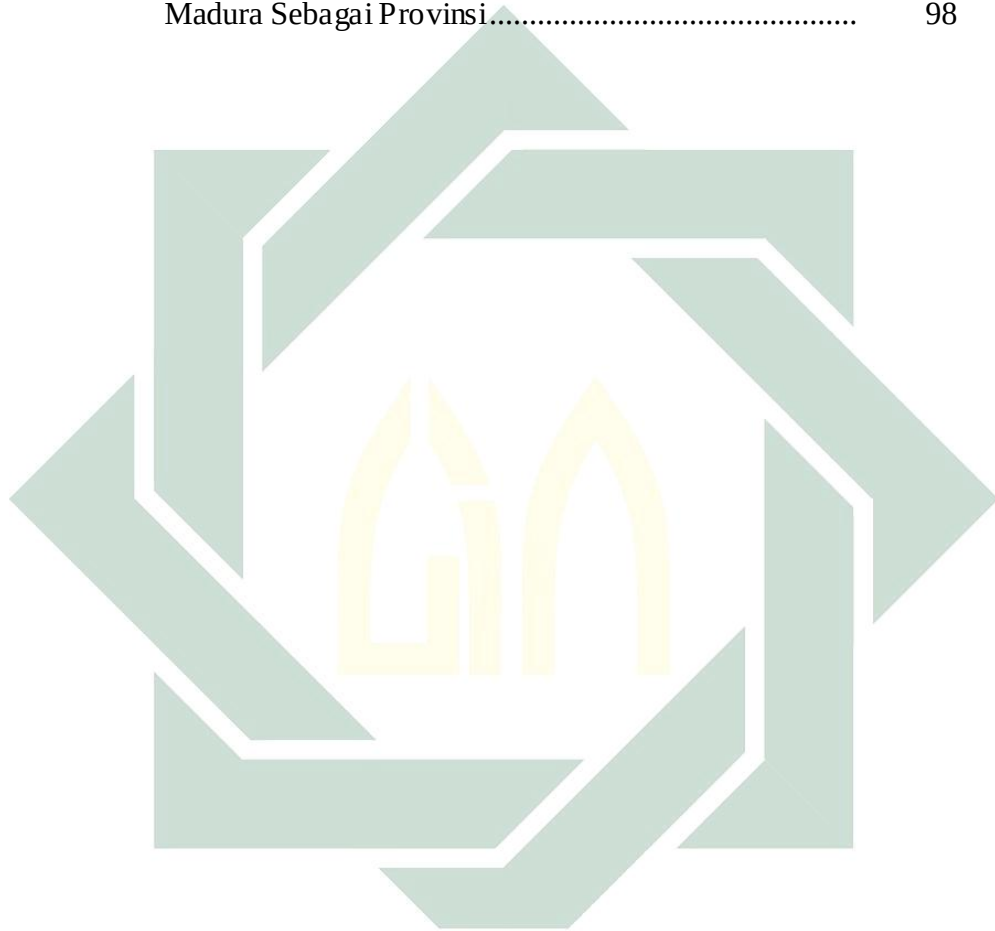


DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 2.1	Kerangka berfikir	51
Tabel 3.1	Jumlah penduduk Perkecamatan yang terdaftar sebagai pemilih tetap	55
Tabel 3.2	Rincian Penghitungan Sampel.....	57
Tabel 4.1	Lokasi Penelitian	65
Tabel 4.2	Pengetahuan Masyarakat Bangkalan Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi	74
Tabel 4.3	klasiikasi responden berdasarkan karakteristik Responden	75
Tabel 4.4	Sumber Pengetahuan masyarakat Bangkalan Dalam Mewujudkan Wacana Pemekaran Madura Sebagai Provinsi	76
Tabel 4.5	Sumber Pengetahuan masyarakat Bangkalan Berdasarkan Karakteristik Responden	76
Tabel 4.6	Waktu mengetahui masarakat Bangkalan Tentang Wacana Kebijakan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi	77
Tabel 4.7	Waktu Mengetahui Masyarakat Bangkalan Berdasarkan Karakteristik Responden	78
Tabel 4.8	Peran Elit Politik Dalam Mensosialisasikan Keinginan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi	79
Tabel 4.9	Peran Elit Politik Dalam Mensosialisasikan Menurut Karakteristik Responden.....	79
Tabel 4.10	Kuanitas Sosialisasi Yang Dilakukan Oleh Elit Politik.....	80
Tabel 4.11	Kuantitas Sosialisasi Yang Dilakukan Oleh Elit Politik Berdasarkan Karakteristik Responden	81

Tabel 4.12	Hasil Angket Indikator Pengetahuan Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi	82	
Tabel 4.13	Persepsi Masyarakat Bangkalan Dalam Mewujudkan Keinginan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi Dapat Mempercepat Pelayanan Masyarakat Madura	85	
Tabel 4.14	Pendapat Masyarakat Bangkalan Dalam Mewujudkan Percepatan Pelayanan Berdasarkan Karakteristik Responden		85
Tabel 4.15	Pendapat Masyarakat Bangkalan Tentang Keinginan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	86	
Tabel 4.16	Pendapat Masyarakat Bangkalan Dalam Mewujudkan Keinginan Elit Politik Terhadap Pemekaran Madura Sebagai Provinsi Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Berdasarkan Karakteristik Responden	87	
Tabel 4.17	Pendapat Masyarakat Bangkalan Dalam Mewujudkan Keinginan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi Dapat Mengembangkan di Madura	88	
Tabel 4.18	Pendapat Masyarakat Bangkalan Dalam Mewujudkan Pengembangan Potensi Sumber Daya Berdasarkan Karakteristik Responden	88	
Tabel 4.19	Hasil Angket Indikator Pemahaman Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi	90	
Tabel 4.20	Persepsi Masyarakat Bangkalan Dalam Mewujudkan Keinginan Madura Sebagai Provinsi Lekat Dengan Kepentingan Segelintir Orang Atau Kepentingan Elit Politik		92
Tabel 4.21	Karakteristik Responden	93	
Tabel 4.22	Persepsi Masyarakat bangkalan Dalam Mewujudkan Keinginan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi	94	

Tabel 4.23	Persepsi Masyarakat Bangkalan Berdasarkan Karakteristik Responden	94
Tabel 4.24	Hasil Angket Indikator Evaluasi Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi	95
Tabel 4.25	Hasil Angket Persepsi Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi.....	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin	70
Gambar 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	71
Gambar 4.3	Karakteristik responden berdasarkan Tingkat Pendidikan	72
Gambar 4.4	Karakteristik Responden berdasarkan pekerjaan	72
Gambar 5.1	Persepsi Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi.....	113
Gambar 5.2	Pengetahuan Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi.....	115
Gambar 5.3	Pemahaman Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi.....	117
Gambar 5.4	Evaluasi/Penilaian Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi	119

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Persepsi Masyarakat Bangkalan dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provisni*”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Persepsi Masyarakat Bangkalan dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provisni? Tujuan dari penelitian ini ialah: Mendeskripsikan Persepsi Masyarakat Bangkalan dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provisni.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian statistik diskriptif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden, yang diambil secara sampling kuota, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: observasi, angket, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan analisis rumus persentase dengan bantuan SPSS versi 16.0.

Hasil penelitian di dapat dari Persepsi masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam Mewujudkan pemekaran madura sebagi provinsi adalah Baik sebanyak 81% sedangkan Sangat Baik 18% adapun yang memiliki persepsi tidak baik sebanyak 1% dan tidak satupun orang yang mengatakan sangat tidak baik. Jika dilihat dari masing-masing indikator yang meliputi **pertama**, Pengetahuan masyarakat bangkalan yang memiliki pengetahuan baik terhadap keinginan elit politik tentang pemekaran madura sebagai provinsi sebanyak 75%. sedangkan tidak mengetahui berjumlah 17%, sangat mengetahui berjumlah 8% dan tidak satupun orang yang mengatakan sangat tidak mengetahui. **Kedua**, pemahaman, Masyarakat Bangkalan yang memiliki pemahaman baik Terhadap Keinginan Elit Politik Tentang Pemekaran Madura Sebagai Provinsi sebanyak 52%, sedangkan sangat memahami berjumlah 33% tidak memahami berjumlah 14%, sangat tidak memahami berjumlah 1%. **Ketiga**, Penilaian Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi baik sebanyak 74% sedangkan tidak baik berjumlah 16%, sangat baik berjumlah 9% sangat tidak baik berjumlah 1%.

Kata Kunci : Persepsi, masyarakat Madura, provinsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana pemekaran madura sebagai provinsi untuk menjadi sebuah Provinsi sudah lama muncul menjadi wacana publik khususnya di daerah madura, Isu pemekaran diawali oleh masyarakat luar Madura, yakni bermula dari pertanyaan yang diajukan Prof. DR, Ryaas Rasyid, saat menjabat Menteri Otonomi Daerah pada kabinet Presiden Abdurahman Wahid pada tahun 1999, kepada Bupati Bangkalan dan sejumlah Ulama lainnya.¹

Berangkat dari pertanyaan Prof. Ryaas Rasyid, tokoh, ulama, LSM, pejabat Madura menindak lanjutnya dengan mengadakan Pra-semiloka Nasional dengan tema Madura Menyongsong Otonomi Daerah dibuka Ryaas Rasyid dan ditutup Yusril pada Tanggal 04 Bulan Desember tahun 1999.² Pada 5 Desember 1999, Menteri otonomi daerah Ryaas Rasyid, melanjutkan pertemuan dan silaturahmi dengan ulama Se-Madura bertempat di Ponpes Syaichona Cholil asuhan KH Abdullah Sahal. Pada hari yang sama, Ryaas Rasyid pun menuju Gedung Serba Guna Universitas Bangkalan, untuk membuka secara resmi acara Semiloka Nasional. Acara ini tentu menjadi fase Pertama perkembangan Wacana Provinsi Madura.³

Secara historisasi sejak jaman penjajahan Belanda, Madura sudah di istimewa oleh pemerintah kolonial salah satunya Madura dibentuk

¹ <http://provinsimadura.blogspot.co.id/2008/06/> Diakses pada tanggal 10 September 2017 jam 21.00

² ibid

³ Ibid

Karesidenan sendiri dengan ibukota karesidenannya Pamekasan yang hingga sekarang gedung karesidenan tersebut masih kokoh berdiri sebagai bukti sejarah. Kedua pengistimewaan Madura oleh pemerintah Hindia Belanda perundang-undangannya yakni HIR (*Herzein inlandsch reglement*) yang selalu menyebutkan istilah peraturan ini berlaku untuk Jawa dan Madura atau peraturan ini berlaku untuk luar Jawa dan Madura.

Pasca Proklamasi kemerdekaan yakni 1948 M pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadikan Madura sebagai Negara bagian yakni Negara Madura dimana akhirnya RIS dibubarkan menjadi NKRI.

Secara sumber daya manusia (SDM) Madura unggul dengan tipikal pekerja keras, tak kenal menyerah, tokoh-tokoh nasional mulai orde lama, orde baru hingga orde reformasi saat ini menduduki posisi penting di pemerintahan pusat mampu Provinsi Jatim baik sipil maupun militer sebut saja R.Hartono (Jendral TNI), A.Rahman (Jaksa agung) Rusman Hadi (Jenderal Polri) Mahfud MD (ketua MK), Moh Noer (Gubernur Jatim). Dan mengenai klaim bahwa 70% penduduk Madura tak lulus SD (Formal) mungkin itu dulu, sekarang seiring pembangunan lembaga pendidikan yang begitu pesat di Madura, terutama perguruan tinggi dan swasta, tampaknya klaim tersebut perlu direvisi ulang.

Secara sumber daya alam (SDA) Madura sangat kaya Raya di bidang Minyak dan Gas. di Pamekasan, Petro China telah mengidentifikasi ± 1000 titik migas lewat surveinya, Di Sumenep puluhan perusahaan Investor beroperasi sejak 1984, di Sampang sejak beberapa tahun lalu SANTOS telah melakukan eksploitasi minyak di lepas pantai Camplong, dan di perairan Bangkalan PT

Kodeco telah melakukan kegiatan eksploitasi. kemana-mana hasilnya minyak dan gas Madura di alirkan ke Jawa lewat pipa bawah laut hal itu terungkap saat ledakan pipa gas di Porong Sidoarjo 2006 lalu yang ternyata berasal dari pulau pagerungan besar. Madura hanya mendapat pembagian 20 % dari Jawa Timur itupun dibagi 4 Kabupaten. jika Madura menjadi Provinsi maka tiap kabupaten akan mendapat 20 %, selain itu para Investor migas dan non migas akan langsung negosiasi ke Madura tidak usah ke Jawa Timur lagi. Sehingga cepat atau lambat pembangunan kesejahteraan masyarakat Madura akan tercapai, masyarakat Madura tak perlu merantau ke luar Madura dan tidak perlu tidak kersan di Madura karena arah pembangunan sudah terfokus dan terarah serta merata.⁴

Banyak masyarakat Madura tepatnya di empat kabupaten yang mengharapkan Madura secepatnya menjadi provinsi' masyarakat Madura sadar akan manfaat yang akan didapat kalau Madura sudah jadi provinsi. Masyarakat maka Madura yang akan merasakannya, pengangguran dapat ditekan, ketimpangan ekonomi dapat diminimalisir jika Madura jadi provinsi. pembangunan gedung gedung pemerintah yang awalnya ada di Jawa maka akan dibangun di Madura, awalnya dana pembangunan dan share dana migas menunggu pembagian dari Jawa Timur maka itu semua tak perlu lagi.

Perihal terbentuknya Provinsi Madura telah disepakati dan didorong empat bupati di Pulau Madura. Yakni, Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad, Bupati Sampang Fanan Hasib, Bupati Pamekasan Ahmad Syafii dan Bupati Sumenep Busyro Karim. Setahun belakangan ini, para bupati itu intensif menggelar

⁴ <https://economy.okezone.com/read/2015/11/16/320/1250360/madura-mau-jadi-provinsi-baru-punya-apa-saja> Diakses pada tanggal 19 September 2017

pertemuan lahirnya Provinsi Madura. Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, juru bicara bupati di Madura menegaskan, sudah lama jutaan warga di Pulau Madura menginginkan hidup terpisah dan melepaskan diri otonomi Provinsi Jawa Timur.⁵

Dasarnya, Pulau Madura selama ini memiliki kekayaan SDA (Sumber Daya Alam) seperti tambang minyak dan gas, hasil hutan dan perkebunan serta hasil tangkap ikan dan produksi garam. Selain itu sektor SDM (Sumber Daya Manusia) juga cukup memadai untuk melahirkan Provinsi Madura.

Tekad untuk mendirikan provinsi baru bernama Provinsi Madura telah disepakati oleh empat bupati sekaligus. Selain itu dorongan dan dukungan dari anggota dewan untuk terbentuknya Provinsi Madura yang otonom datang pula dari kalangan tokoh masyarakat, kalangan alim ulama dan kalangan cerdik pandai di perguruan tinggi. Secara administratif, Pulau Madura memiliki luas 5.168 Km² dengan populasi penduduk 3,7 juta berkepadatan 706 jiwa/Km². Pulau Madura memiliki 127 pulau dengan kepulauan terluas Pulau Kangean dan Pulau Masalembu. Pulau Madura memiliki bahasa Madura sebagai bahasa daerah.⁶ Undang-undang yang mengatur Pemekaran daerah:⁷

1. Pasal 35 Ayat 4a, UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.⁸
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 7 dan 8 mengatur legislasi penetapannya.

⁵ <https://news.detik.com/jawatimur/3313129/pulau-madura-akan-jadi-provinsi-yang-didukung-empat-bupati> Diakses pada tanggal 11 Agustus 2017 jam 23.21 WIB

⁶ <https://news.detik.com/jawatimur/3313129/pulau-madura-akan-jadi-provinsi-yang-didukung-empat-bupati> Diakses pada tanggal 11 Agustus 2017 jam 23.21 WIB

⁷ http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_pemekaran.pdf Diakses pada tanggal 19 september 2017

⁸ http://gtk.kemdikbud.go.id/files/produk_hukum/uu_23_tahun_2014.pdf. diakses pada 26 September 2017.

3. PP nomor 78 tahun 2007, tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan Penggabungan daerah belum secara spesifik muncul pengaturan wilayah perbatasan antar Negara.
4. PP nomor 78 tahun 2007, tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan Penggabungan daerah belum secara spesifik muncul pengaturan wilayah kepulauan.
5. PP 78 Pasal 12 Ayat 3 ayat 4 Tahun 2007
6. PP 78 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2007
7. UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan Pasal 18 ayat 1 dan 2.

Dalam Pasal 35 Ayat 4a, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebuah provinsi harus memiliki minimal 5 wilayah kabupaten ataupun kota. Untuk memenuhi UU ini, ada keinginan untuk menambah satu kota di wilayah Kabupaten Bangkalan. Yakni wilayah Kecamatan Kamal hendak dinaikkan menjadi Kota Kamal. Ada pula keinginan warga Kabupaten Sumenep untuk membentuk satu kabupaten baru bernama Kabupaten Kepulauan. Wilayahnya merupakan sejumlah pulau berpenghuni seperti Pulau Kangean, Pulau Masalembu, Pulau Sapudi, Pulau Sapeken, Pulau Giligenting dan Pulau Raas.

Keinginan warga Pulau Madura untuk mendirikan provinsi yang otonom telah lama diperjuangkan. Tidak hanya oleh ke empat bupati tersebut. Namun sejumlah ormas (organisasi masyarakat), tokoh ulama dan kalangan organisasi

kemahasiswaan di Madura ikut menggelar kebulatan tekad untuk menjadikan Madura sebagai provinsi otonom.

Dalam dialog di Ponpes Syaichona Cholil, dibicarakan soal Propinsi Madura. Jika Madura ingin jadi provinsi, kalau memang serius, perlu dipersiapkan. Berangkat dari aspirasi masyarakat, bentuk kesepakatan politis DPRD Se-Madura, yang kemudian diajukan ke pusat, sehingga pusat nantinya akan membentuk dua tim. Tim pertama membicarakan aspek teknis kelayakan Madura menjadi Propinsi, dalam hal ini dipimpin pemerintah dan tim kedua, berkenaan dengan aspek politis, yakni menyelidiki apakah pembentukan Propinsi Madura merupakan aspirasi masyarakat madura, dalam tim ini dilakukan oleh Komisi II DPR RI.⁹

Keinginan madura untuk memisahkan dari Jawa Timur, selama memenuhi syarat untuk menjadi sebuah provinsi, apalagi jika alasan pemekaran ini adalah untuk pemerataan pembangunan. Banyak faktor yang menyebabkan mengapa akhirnya keinginan untuk mekar ini lahir, salah satu diantaranya yakni terjadinya kesenjangan pembangunan di wilayah madura, pembangunan lebih terkonsentrasi di wilayah madura.¹⁰

Madura juga memiliki sumber daya alam misalnya sumber minyak gas di Pulau Mandangin Sampang dan di Kecamatan Geger Pamekasan, di dua daerah tersebut memiliki 104 blok migas dan baru 14 blok saja yang sudah dieksploitasikan, selain itu di Madura juga dikenal sebagai pulau penghasil garam

⁹<http://regional.kompas.com/read/2016/08/28/16260421/panitia.provinsi.madura.minta.perlakuan.khusus> Diakses tanggal 12 Desember 2016

¹⁰ Zamroni, I. 2012. Dinamika Elite Lokal Madura. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. 17 (1) hal 23-48

terbesar, serta tembakau yang diakui paling berkualitas di Tanah Air. Di pandang secara data dan administrasi pemerintahan, dari itu Madura layak menjadi provinsi, terutama tentang luas wilayah yang melebihi dua provinsi baru (Gorontalo dan Kepulauan Riau). Dengan alasan tersebut Madura mempunyai keinginan memisahkan diri dari Jawa Timur sedangkan pembentukan provinsi harus memiliki minimal lima kabupaten.

Pada tahun 1999 Indonesia hanya memiliki 26 provinsi setelah lepasnya Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwa. Namun setelah itu Indonesia banyak mengalami perubahan khususnya untuk jumlah provinsi, tercatat hingga saat ini Indonesia telah memiliki 8 provinsi baru. Dan inilah nama-nama provinsi baru di Indonesia hasil pemekaran beserta dengan nama ibukotanya dan tahun terbentuknya.¹¹

1. Provinsi Maluku Utara, provinsi dengan ibukota di Kota Sofifi ini terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999. Provinsi yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Maluku ini merupakan provinsi di Indonesia yang ke-27.
2. Provinsi Banten, provinsi dengan ibukota di Kota Serang ini terbentuk pada tanggal 17 Oktober 2000. Provinsi yang merupakan hasil pemekaran Provinsi Jawa Barat ini merupakan provinsi di Indonesia yang ke-28.
3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, provinsi dengan ibukota di Kota Pangkal Pinang ini terbentuk pada tanggal 4 Desember 2000. Provinsi ini dimekarkan dari Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi provinsi ke-29.

¹¹http://www.google.com/url?q=https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/download/105/104&sa=U&ved=0ahUKEwjLqZGsy9TVAhWKN08KHxfNC7kQFggkMAM&usg=AFQjCNFvHupXL_qz4PFkmiStV4OzZL4m0Q Diakses Pada tanggal 13 Agustus Jam 23.00 WIB

4. Provinsi Gorontalo, provinsi dengan ibukota di Kota Gorontalo ini terbentuk pada tanggal 22 Desember 2000. Provinsi yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara ini adalah provinsi ke-30 Indonesia.
5. Provinsi Papua Barat, provinsi yang beribukota di Kota Manokwari ini terbentuk tanggal 21 November 2001. Provinsi yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua ini merupakan provinsi di Indonesia ke-31.
6. Provinsi Kepulauan Riau, provinsi dengan ibukota Tanjung Pinang itu terbentuk pada tanggal 25 Oktober 2002. Provinsi yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Riau ini menjadi provinsi yang ke-32 di Indonesia.
7. Provinsi Sulawesi Barat, provinsi yang ibukotanya di Kota Mamuju ini terbentuk tanggal 5 Oktober 2004. Provinsi yang terbentuk dari pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan provinsi ke-33 Indonesia.
8. Provinsi Kalimantan Utara, provinsi dengan ibukotanya Tanjung Selor ini terbentuk pada tanggal 25 Oktober 2012. Provinsi ini merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Kaltim dan menjadi provinsi ke-34 Indonesia.

Persoalannya adalah apakah menjadikan Madura sebagai provinsi ini akan lebih baik mengingat pengaruh (dampak) yang akan terjadi apabila Madura menjadi provinsi itu harus dipertimbangkan, sebab bila tidak tepat pertimbangan yang diberikan untuk pemekaran daerah hanya akan memberikan makna yang "tidak penting" dan "tidak berarti" bagi masyarakat. dengan pemekaran daerah mengatakan bahwa: "Aspirasi memekarkan daerah itu atas dasar pertimbangan yang tepat, misalnya dengan pemekaran daerah pusat pemerintahan dan pelayanan semakin dekat dengan masyarakat, partisipasi masyarakat akan bertambah dan

lebih intensif dalam kehidupan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan didaerahnya.

Sedangkan bila timbulnya aspirasi itu lebih karena emosional, primordialisme dan semata-mata hanya ingin menjadi daerah otonom sendiri, tidak atas dasar persyaratan yang tepat, tidak memperhitungkan potensi sumber yang ada, akan mempersulit kondisi masyarakat daerah tersebut, dan tidak akan menjamin pengembangan daerah kearah yang lebih baik, bahkan melemahkan tingkat ketahanan wilayah karena akan mendatangkan berbagai beban dan persoalan.

Disisi lain Kebijakan Pemekaran Wilayah Provinsi Madura ini seolah-olah hanya wacana yang dilontorkan oleh beberapa pihak elit politik Madura dan beberapa Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) bukan aspirasi dari masyarakat madura. Sangat realistis ketika Madura menjadi provinsi maka secara otomatis para elit politik sangat mudah untuk mempengaruhi segala kebijakan. Dari latar belakang tersebut tentunya perlu untuk dikaji bagaimana persepsi masyarakat Madura terhadap keinginan elit politik dalam Mewujudkan Pemekaran wilayah Madura menjadi provinsi baru. Dalam penelitian ini tidak semua masyarakat Madura menjadi objek penelitian. Peneliti hanya mengambil sampel masyarakat di kabupaten Bangkalan karena beberapa hal. *Pertama*, kabupaten Bangkalan merupakan daerah yang berdekatan dengan wilayah administrasi pemerintahan Jawa Timur sehingga diasumsikan masyarakat kabupaten Bangkalan lebih mengetahui informasi pemekaran daripada masyarakat kabupaten lainnya. *Kedua*, karena kabupaten Bangkalan merupakan daerah yang menghubungkan pulau

Madura ke pulau Jawa dengan adanya pelabuhan Kamal dan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), maka kabupaten Bangkalan merupakan tempat yang masif akan sosialisasi pemekaran terhadap masyarakat Madura daripada kabupaten lainnya. Salah satu sosialisasinya yang tampak familiar adalah pemasangan banner tentang pemekaran Madura sebagai provinsi di sepanjang jalan pintu masuk kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu, masyarakat Bangkalan merupakan masyarakat yang tepat untuk diteliti sebagai sampel persepsi masyarakat Madura terhadap pemekaran Madura sebagai provinsi.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, penulis bermaksud meneliti Persepsi masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi. Karena penelitian ini adalah variabel tunggal, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: Bagaimana Persepsi masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi?

C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan ini, penulis perlu untuk memberikan batasan masalah pada judul “Persepsi masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi” yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti Terbatas pada Persepsi masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan Pemekaran Provinsi Madura khususnya Masyarakat kabupaten Bangkalan.
2. Lokasi penelitian ini adalah di kabupaten Bangkalan karena Elit Politik yang menginisiasi Keinginan Madura Menjadi Provinsi Mayoritas elit politik Bangkalan yang meliputi Masyarakat, kiai atau tokoh, aktivis, dan *blater* di Bangkalan.
3. Bangkalan terdiri dari 18 kecamatan. Lokasi ini dipilih karena kabupaten Bangkalan merupakan tempat yang strategis untuk mensosialisasikan pemekaran Madura sebagai provinsi. Selain letak geografisnya berdekatan dengan wilayah pemerintahan provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan juga menjadi tempat terdepan yang menghubungkan kabupaten-kabupaten di pulau Madura dengan dengan kabupaten/ kota lainnya yang berada di pulau Jawa yakni dengan adanya jembatan Suramadu dan pelabuhan Kamal.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Mengetahui persepsi masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi, yang meliputi pengetahuan, pemahaman dan penilaian atau penilaian dari masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Berhubungan dengan tujuan penulisan di atas maka penulis paparkan manfaat dari penulisan ini adalah

1. Manfaat Teoritis: Dari segi teoritis penelitian ini merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan kebijakan. Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat kepada UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya kepada mahasiswa/mahasiswi maupun dosen dan perpustakaan sebagai bahan bacaan yang bersifat ilmiah dan sebagai kontribusi intelektual.
2. Manfaat Praksis: Sedangkan dari segi praksis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Pemerintah dan Masyarakat Madura khususnya kabupaten Bangkalan, Bahan masukan bagi daerah-daerah lain yang akan memekarkan diri untuk menjadi Kabupaten atau Kota yang baru. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan analisa dan wacana kedepannya.

F. Definisi Operasional

1. Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan pengalaman masyarakat tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, pada saat menafsirkan pesan informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspetasi, motivasi dan memori.¹² Selanjutnya ada tiga tahapan yang mempengaruhi persepsi yang kesemua tahapan tersebut bersifat kontinu satu dengan lainnya.

2. Kebijakan Elit politik Tentang Pemekaran Madura sebagai provinsi

Kebijakan Elit politik adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan ini dilakukan oleh orang tertentu yang berkuasa dan mengemban tugas dengan kedudukan tinggi dalam masyarakat.¹³

Elit Politik menurut Teori Politik adalah orang-orang yang memiliki jabatan dalam sistem politik.¹⁴ Dalam penelitian ini Elit Politik terdiri dari pemerintah, kiai/ tokoh masyarakat, aktivis, dan blater yang keempatnya berperan penting dalam kebijakan tersebut.

¹² Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2001), 51.

¹³ Abdul Wahab Solichin, 2002, *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasim ke Implementasi, Kebijaksanaan Negara*, Bina Aksara Jakarta Hal 9

¹⁴ Ibid Hal 10-11

3. Pemekaran Madura

Pemekaran Madura sebagai provinsi adalah proses pembentukan provinsi baru yang dibentuk dari empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Pemekaran memisahkan suatu bagian wilayah yang merupakan suatu kesatuan yang utuh menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri (otonom). Madura yang akan dijadikan sebagai provinsi baru akan dipisah dari wilayah asalnya yaitu provinsi Jawa Timur. Pemisahan ini tidak sekedar pemisahan wilayah dari provinsi Jawa Timur melainkan juga pemisahan administratif dengan pemerintahan Jawa Timur. Dengan demikian Madura sebagai provinsi baru akan mengatur pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur.

G. Variabel Penelitian

Sugiono menjelaskan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel (Variabel tunggal) yaitu Persepsi Masyarakat Bangkalan Tentang Keinginan Elit Politik Tentang Pemekaran Madura Sebagai Provinsi. Adapun indikator variabel ini ialah sebagai berikut:

	Indikator Variable	Sub Indikator Variabel	Item Pertanyaan
Persepsi	Pengetahuan: Penyerapan terhadap objek dari luar individu pada keinginan elit politik tentang pemekaran Madura sebagai provinsi.	Informasi pemekaran Madura sebagai provinsi	Nomor 1
			Nomor 2
			Nomor 3
		Sosialisasi Pemekaran Madura sebagai provinsi	Nomor 4
			Nomor 5
	Pengertian atau Pemahaman: Pengertian atau pemahaman pada keinginan elit politik tentang pemekaran Madura sebagai provinsi.	Tujuan pemekaran	Nomor 6
		Manfaat pemekaran	Nomor 7
			Nomor 8
	Penilaian: penilaian pada keinginan elit politik tentang pemekaran Madura sebagai provinsi.	Penilaian masyarakat	Nomor 9
			Nomor 10

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian kali ini peneliti membagi dalam beberapa sub-Bab bagian pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan (Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Oprasional, Variabel Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II : Kajian Teori (Otonomi daerah, Prinsip otonomi daerah menurut UU No.32 tahun 2004, Pemekaran daerah sebagai implikasi otonomi daerah, Pengertian, sebab-sebab dan tujuan pemekaran wilayah, Konsep

pemekaran wilayah, Dasar hukum pemekaran wilayah, Prosedur dalam pemekaran wilayah, Kesiapan daerah, Hipotesis).

- BAB III : Metode Penelitian (Pendekatan dan Jenis Penelitian, Variabel penelitian, Populasi, Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data).
- BAB IV : Hasil Penelitian, gambar umum lokasi, karakteristik responden, penyajian data
- BAB V : Persepsi masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi, pengetahuan masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik tentang pemekaran Madura sebagai provinsi, Penilaian masyarakat terhadap keinginan elit politik tentang pemekaran Madura sebagai provinsi.
- BAB VI : Penutup. Pada bab ini terdiri dari Kesimpulan Dan Saran
- DAFTAR PUSTAKA
- LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Persepsi Masyarakat

Menurut Bimo Walgito persepsi merupakan proses yang terjadi di dalam individu yang dimulai dengan diterimanya rangsang, sampai rangsang disadari dan dimengerti oleh individu sehingga individu dapat mengenali dirinya sendiri dan keadaan sekitarnya.¹⁵ Menurut Walgito menyatakan bahwa proses terjadinya persepsi bila objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses stimulus mengenai alat indera diteruskan oleh syaraf sensorik ke otak.¹⁶ Proses ini disebut sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran inilah yang disebut psikologis. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf akhir dari proses persepsi adalah individu menyadari tentang apa yang dilihat, diraba, didengar, yaitu stimulus yang diterima melalui indera.

Rahmat mengemukakan pendapatnya bahwa persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi setiap individu dapat sangat berbeda walaupun yang diamati benar-benar sama.¹⁷

¹⁵ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), Cet Ke-4, 87-88

¹⁶ Ibid. 89

¹⁷ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung, 2003 Remaja Rosdakarya) Hal 51

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu proses yang diterima individu melalui alat reseptor yaitu alat indera. Proses penginderaan ini tidak terlepas dari proses persepsi. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia eksternal. Gibson mengemukakan bahwa persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya. Dengan kata lain, persepsi mencakup penerimaan stimulus yang diorganisasikan, dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang diorganisasikan dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap.¹⁸

Pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.

Menurut Hamka proses terjadinya persepsi melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, yaitu proses ditangkapnya suatu stimulus (objek) oleh panca indera.

¹⁸ Haryo S. Martodirjo, *Pemahaman Lintas Budaya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hal. 17

2. Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, yaitu proses diteruskanya stimulus atau objek yang telah diterima alat indera melalui syaraf-syaraf sensoris ke otak.
3. Tahap ketiga merupakan proses yang dikenal dengan nama proses psikologis, yaitu proses dalam otak, sehingga individu mengerti, menyadari, menafsirkan dan menilai objek tersebut.
4. Tahap keempat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan, gambaran atau kesan.¹⁹

Di samping itu ada faktor lain yang dapat mempengaruhi proses persepsi, antara lain:

1. Faktor internal, Individu sebagai faktor internal saling berinteraksi dalam individu mengadakan persepsi. Mengenai keadaan individu yang dapat mempengaruhi hasil persepsi datang dari dua sumber, yaitu berhubungan dengan segi kejasmanian dan segi psikologis. Bila sistem fisiologis terganggu, hal tersebut akan berpengaruh dalam persepsi seseorang. Sedangkan segi psikologis yaitu antara lain mengenai pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan motivasi akan berpengaruh pada seseorang dalam mengadakan persepsi.
2. Faktor eksternal
 - a. Stimulus, Agar stimulus dapat dipersepsi, maka stimulus harus cukup kuat.

Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh dalam persepsi. Stimulus

¹⁹ Muhammad Hamka, *Hubungan antara Persepsi Terhadap Pengawasan Kerja dengan Motivasi Berprestasi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Fakultas Psikologi, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2002), hal. 81

yang kurang jelas akan berpengaruh dalam ketepatan persepsi. Bila stimulus berwujud benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi, karena benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi.

- b. Lingkungan atau situasi, Lingkungan atau situasi khususnya yang melatarbelakangi stimulus juga akan berpengaruh dalam persepsi bila obyek persepsi adalah manusia. Obyek dan lingkungan yang melatarbelakangi obyek merupakan kesatuan yang sulit dipisahkan. Obyek yang sama dengan situasi sosial yang berbeda dapat menghasilkan persepsi yang berbeda.²⁰

Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, pada saat menafsirkan pesan informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi dan memori.²¹ Selanjutnya ada tiga tahapan yang mempengaruhi persepsi yang kesemua tahapan tersebut bersifat kontinu satu dengan lainnya. Tahapan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:²²

1. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu.

Rangsang atau objek dalam hal ini diserap atau diterima oleh berbagai panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap secara

²⁰ Walgito B, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Adi, 2002), hal. 46-47

²¹ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 51.

²² Bimo Walgito, *Psikologi Sosial: Persepsi Sosial*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2003), 54.

sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapatkan gambaran, tanggapan atau kesan didalam otak. Gambaran tersebut dapat tunggal atau jamak, tergantung objek persepsi yang diamati. Di dalam otak terkumpul gambaran-gambaran atau kesan-kesan, baik yang lama maupun yang baru saja terbentuk. Jelas atau tidaknya gambaran tersebut tergantung dari jelas tidaknya rangsangan, normalitas alat indera dan waktu yang baru saja atau sudah lama.

2. Pengertian atau pemahaman

Proses yang telah menjadi gambaran-gambaran atau kesan-kesan di dalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolong-golongkan (dikasifikasi), dibandingkan, diinterpretasikan, sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman, proses terjadinya pengertian atau pemahaman tersebut sangat unik dan cepat. Pengertian yang terbentuk tergantung juga pada gambaran-gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya (disebut apersepsi).

3. Penilaian atau evaluasi

Apabila sudah mengerti dan memahami, terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu persepsi bersifat individual.

B. Elit Politik (Elit Politik Madura)

Garis besar perkembangan elit politik di Indonesia adalah dari yang bersifat tradisional yang berorientasi kosmologis dan berdasarkan keturunan

kepada elit modern yang berorientasi kepada negara kemakmuran, berdasarkan pendidikan. Elit modern ini jauh lebih beraneka ragam daripada elit tradisional.²³

Secara struktural disebutkan tentang administrator-administrator, pegawai-pegawai pemerintah, teknisi-teknisi, orang-orang profesional dan para intelektual, tetapi pada akhirnya perbedaan utama yang dapat dibuat adalah antara elit fungsional dan elit politik. Yang dimaksud dengan elit fungsional adalah pemimpin-pemimpin yang baik pada masa lalu maupun masa sekarang mengabdikan diri untuk kelangsungan berfungsinya suatu negara dan masyarakat yang modern, sedangkan elit politik adalah orang-orang (Indonesia) yang terlibat dalam aktivitas politik untuk berbagai tujuan tapi biasanya bertalian dengan sekedar perubahan politik. Kelompok pertama berlainan dengan yang biasa ditafsirkan, menjalankan fungsi sosial yang lebih besar dengan bertindak sebagai pembawa perubahan, sedangkan golongan kedua lebih mempunyai arti simbolis daripada praktis.²⁴

Elit politik yang dimaksud adalah individu atau kelompok elit yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik. Suzanne Keller²⁵ mengelompokkan ahli yang mengkaji elit politik ke dalam dua golongan. Pertama, ahli yang beranggapan bahwa golongan elite itu adalah tunggal yang biasa disebut elit politik (Aristoteles, Gaetano Mosca dan Pareto). Kedua, ahli yang

²³ Robert van Niel, 1984, *Munculnya Elite Modern Indonesia*, Pustaka Jaya Jakarta. Hal 07

²⁴ Keller Suzanne, 1995, *Penguasa dan Kelompok Elit*, Raja Grafindo Persada Jakarta. Hal 12

²⁵ Lihat Jayadi Nas, *Konflik Elit Di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal*, Hal. 33.

beranggapan bahwa ada sejumlah kaum elit yang berkoeksistensi, berbagi kekuasaan, tanggung jawab, dan hak-hak atau imbalan. (ahlinya adalah Saint Simon, Karl Mainnheim, dan Raymond Aron).

Menurut Aristoteles, elit adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh dua sosiolog politik Italia, yakni Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca.²⁶

Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elit berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Pareto lebih lanjut membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu pertama elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non governing elite*). Kedua, lapisan rendah (*non- elite*) kajian tentang elit politik lebih jauh dilakukan oleh Mosca yang mengembangkan teori elit politik. Menurut Mosca, dalam semua masyarakat, mulai dari yang paling giat mengembangkan diri serta mencapai fajar

²⁶ Ibid. Hal. 34

peradaban, hingga pada masyarakat yang paling maju dan kuat selalu muncul dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah, biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh kelas yang memerintah.²⁷ Dalam penelitian ini yang dimaksud Elit Politik terdiri dari pemerintah, kiai (yang terjun kedalam pemerintahan seperti: kiai yang menjabat bupati dan DPR/D, dan yang ikut partai politik), aktivis, dan blater.

C. Pemekaran Wilayah/ Daerah

Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan Daerah baru.²⁸ Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Dalam konteks UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Untuk Pembentukan Daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah. Pembentukan Daerah didahului dengan masa persiapan selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk penyiapan Daerah tersebut menjadi Daerah. Apabila setelah tiga tahun hasil evaluasi menunjukkan Daerah Persiapan

²⁷ Ibid.

²⁸ Hamdi Muchlis, Naskah Akademik Tentang Pembentukan dan Penghapusan Daerah, BPH,DEPKUMHAM RI, Jakarta,2008. 1

tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, statusnya dikembalikan ke Daerah induknya. Apabila Daerah Persiapan setelah melalui masa pembinaan selama tiga tahun memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, maka Daerah Persiapan tersebut dibentuk melalui undang-undang menjadi Daerah. Mekanisme pembentukan wilayah tercantum dalam peraturan pemerintah no.78 tahun 2007 tentang cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.

1. Konsep Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah kabupaten/kota menjadi beberapa kabupaten/kota baru pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon kabupaten/kota yang baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak timbul disparitas yang mencolok dimasa mendatang. Selanjutnya dalam suatu usaha pemekaran wilayah akan diciptakan ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru ini akan mempengaruhi aktivitas seseorang atau masyarakat sehingga merasa diuntungkan karena pelayanannya yang lebih maksimal.²⁹

Akhirnya pemekaran wilayah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan sumber daya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup.

²⁹ Syaukani, HR dkk. (2002), *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta Hal 203

2. Pengertian, Sebab-sebab, dan Tujuan Pemekaran Wilayah

Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.³⁰

Menurut UU No.24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang, wilayah adalah ruang kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.³¹ bahwa wilayah dapat dibedakan berdasarkan cara pandang terkait dengan kondisinya atau berdasarkan fungsinya, yaitu :

1. *Wilayah subjektif*, yakni wilayah merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang berdasarkan suatu lokasi dengan kriteria tertentu dan tujuan tertentu.
2. *Wilayah objektif*, maksudnya wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri atau gejala alam di setiap wilayah.

³⁰ Bintoro Tjokroamidjojo,. 2001. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika hal 23

³¹ Tarigan, R. 2006. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara Jakarta hal 89

Blair (1991) dalam Malik (2006) menyebutkan bahwa dalam menganalisis wilayah dikenal 3 tipe, yakni³² :

1. *Wilayah fungsional*, yaitu adanya saling interaksi antara komponen-komponen didalam dan diluar wilayahnya. Wujud wilayah sering disebut wilayah nodal yang didasari oleh susunan dari suatu hubungan di antara simpul-simpul perdagangan.
2. *Wilayah homogen*, artinya adanya relatif kemiripan dalam suatu wilayah.
3. *Wilayah administratif*, artinya wilayah ini dibentuk untuk kepentingan wilayah pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain.

Sementara itu, tujuan wilayah menurut Sihotang (1997) dalam Malik (2006) adalah sebagai suatu usaha untuk menentukan batas-batas daerah yang biasanya lebih besar daripada daerah struktur pemerintahan lokal, dengan maksud lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah beserta perencanaan lokal dan nasionalnya.³³

Secara umum, pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Terdapat beberapa alasan mengapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang

³² Ibid hal 90

³³ Sihotang (1997) dalam Malik (2006) "*Himpunan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Peraturan Perundangan*" Tentang Pemerintah Daerah di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta Hal 90

cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu:³⁴

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berdasarkan potensi lokal . Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

³⁴ Ibid hal. 112

Disisi lain, menurut *Syafrizal (2008) dalam Ventrata (2009)*, ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya pemekaran wilayah, antara lain³⁵ :

1. *Perbedaan agama* Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan timbulnya keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari suatu negara/ daerah yang telah ada untuk menjadi negara/ daerah baru.
2. *Perbedaan etnis dan budaya* Sama halnya dengan perbedaan agama, perbedaan etnis dan budaya juga merupakan unsur penting lainnya yang dapat memicu terjadinya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat merasa kurang nyaman bila hidup dalam suatu masyarakat dengan etnis, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda. Bila kesatuan budaya ini terganggu karena kehadiran warga masyarakat lain dengan budaya yang berbeda, maka seringkali terjadi ketegangan bahkan konflik sosial dalam masyarakat tersebut.
3. *Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah* Aspek berikutnya yang cenderung menjadi pemicu terjadinya pemekaran wilayah adalah ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. Termasuk juga ke dalam aspek ini adalah ketimpangan dalam ketersediaan sumber daya alam bernilai tinggi, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang

³⁵ Syafrizal (2008) dalam Ventrata (2009) “.Mengelola Dinamika Politik dan Sumber Daya Daerah (edisi ke-2), Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD) UGM, Yogyakarta hal 114

selanjutnya akan mendorong terjadinya ketimpangan kemakmuran antar daerah. Ketimpangan ini selanjutnya mendorong terjadinya kecemburuan sosial dan merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat sehingga akhirnya muncul keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Indikasi terjadinya ketimpangan pembangunan antardaerah dapat diketahui dengan menghitung data PDRB perkapita dan jumlah penduduk sebagai indikator utama melalui Indeks Wiliamson.

4. *Luas daerah* Luas daerah dapat pula memicu timbulnya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Alasannya adalah karena wilayah yang besar akan cenderung menyebabkan pelayanan public tidak dapat dilakukan secara efektif dan merata ke seluruh pelosok daerah. Sementara tugas pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat di daerahnya. Dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pemekaran daerah.

Pemekaran wilayah diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah. Tujuan pemekaran sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui³⁶:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi.
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah.

³⁶ Syaukani HR, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hal. 301

4. Percepatan pengelolaan potensi daerah.
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban.
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

3. Dasar Hukum Pemekaran Wilayah

UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) bahwa, *“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”*. Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”*³⁷

Secara lebih khusus, UU No.32 Tahun 2004 mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. UU No.32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Kemudian, ayat (2) pasal yang sama menyebutkan, *“Undang-undang*

³⁷ UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B

pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah”³⁸

Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya (ayat (3)) yang menyatakan bahwa, *“Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.”* Dan ayat (4) menyebutkan, *“Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan”.*

Namun demikian, pembentukan daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Bagi propinsi, Syarat administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah propinsi bersangkutan, persetujuan DPRD propinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk kabupaten/kota, syarat administratif yang juga harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan,

³⁸ UU No.32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Kemudian, ayat (2)

persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor-faktor di bawah ini, antara lain :³⁹

1. Kemampuan ekonomi, merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung disuatu daerah propinsi, kabupaten/kota, yang dapat diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penerimaan daerah sendiri.
2. Potensi daerah, merupakan cerminan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari lembaga keuangan, sarana ekonomi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transportasi dan komunikasi, sarana pariwisata dan ketenagakerjaan.
3. Sosial budaya, merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, kondisi sosial masyarakat yang dapat diukur dari tempat peribadatan, tempat kegiatan institusi sosial dan budaya, serta sarana olahraga.
4. Sosial politik, merupakan cerminan kondisi sosial politik masyarakat yang dapat diukur dari partisipasi masyarakat dalam politik dan organisasi kemasyarakatan.
5. Kependudukan, merupakan jumlah total penduduk suatu daerah.
6. Luas daerah, merupakan luas tertentu suatu daerah.

³⁹ http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_pemekaran.pdf Diunduh pada tanggal 1 maret 2011 jam 20.00

7. Pertahanan dan keamanan

4. Prosedur Dalam Pemekaran Wilayah

Inisiatif pemekaran wilayah pada dasarnya berangkat dari adanya peluang hukum bagi masyarakat dan daerah untuk melakukan pemekaran/ penggabungan wilayah sebagaimana tertuang dalam UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari sisi pemerintah pusat, proses pembahasan pemekaran wilayah yang datang dari berbagai daerah melalui dua tahapan besar yaitu proses teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif), serta proses politik karena selain harus memenuhi persyaratan teknokratis yang telah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah, proposal pemekaran harus didukung secara politis oleh DPR. Berikut akan digambarkan tentang skema proses pengusulan pemekaran di tingkat daerah.

Persiapan dalam pemekaran wilayah dimulai dari wilayah yang mengusulkan. Usulan-usulan tersebut berbentuk proposal yang sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan di dalamnya dan kajian-kajian ilmiah, sehingga ketika proposal rencana pemekaran wilayah tersebut diajukan ke DPRD kabupaten/ kota dan kemudian ke propinsi, dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan peraturan-peraturan yang berlaku.

Dalam rangka memahami proses kebijakan pemekaran, perlu digambarkan bagaimana pemerintah nasional meloloskan usulan pemekaran

daerah otonom. Prosedur pembahasan ditingkat pusat untuk “meluluskan atau tidak meluluskan”.

Tahapan dan prosedur pembentukan daerah kabupaten/kota menurut pasal 16 PP No.129 Tahun 2000, yang terdiri dari⁴⁰:

- a. Ada kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat yang bersangkutan.
- b. Pembentukan daerah harus didukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Usul pembentukan kabupaten/kota disampaikan kepada Pemerintah . Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur dengan dilampirkan hasil penelitian daerah dan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota serta persetujuan propinsi, yang dituangkan dalam keputusan DPRD.
- d. Dengan memperhatikan usulan Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memproses lebih lanjut dan dapat menugaskan Tim untuk melakukan observasi ke daerah yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Berdasarkan rekomendasi pada huruf d, Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah meminta tanggapan para anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan dapat menugaskan Tim Teknis Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah untuk melakukan penelitian lebih lanjut di lapangan.

⁴⁰ www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/66/1213.bpkp Diakses pada tanggal 20 Maret 2017 jam 11.00

- e. Para anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah memberikan saran dan pendapat secara tertulis kepada Ketua Dewan Pertimbangan otonomi Daerah. Usul pembentukan suatu daerah diputuskan dalam rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- f. Apabila berdasarkan hasil keputusan rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyetujui usul pembentukan Daerah, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengajukan usul pembentukan Daerah tersebut beserta Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah kepada Presiden.
- g. Apabila Presiden menyetujui usul dimaksud, Rancangan Undang-undang pembentukan Daerah disampaikan kepada DPR-RI untuk mendapat persetujuan.

5. Kesiapan Daerah

a. Potensi Wilayah

Luas keseluruhan pulau Madura kurang lebih 5.168 kilometer (km), atau kurang lebih 10% luas Jawa Timur. Adapun panjang daratan kepulauannya dari ujung barat di Kamal sampai dengan ujung timur di Kalianget sekitar 180 km dan lebarnya berkisar 40 km. Pulau ini terbagi dalam empat wilayah kabupaten. Dengan Luas wilayah untuk kabupaten Bangkalan 1.144, 75 km terbagi dalam 8 wilayah kecamatan, kabupaten Sampang berluas wilayah 1.321, 86 km, terbagi dalam 12 kecamatan, Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah 844,19 km, yang terbagi dalam 13 kecamatan, dan Kabupaten Sumenep mempunyai luas 1.857,530

km, terbagi dalam 27 kecamatan yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan.⁴¹

Kota-kota eks Karesidenan Madura meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep dan Kalianget. Masih menurut Humied, Madura tempo dulu dan kini jauh berbeda. Kondisinya berbalik 180 derajat. Apabila dulu dikenal sebagai kaum pedagang internasional, kaum negarawan, para musafir hingga tokoh agama banyak berkecimpung dalam urusan dalam negeri baik untuk perniagaan, bertukar pikiran hingga syiar agama Islam yang termuat dalam berbagai cerita rakyat dan dokumen kerajaan di Madura.

Madura bisa dikatakan ‘duduk’ di atas ladang minyak dan gas. Dengan kata lain di bawah pulau Madura itu terhampar ladang migas yang jumlahnya bisa mencapai miliaran kaki kubik. Hal inilah, yang menjadikan Madura itu panas, gersang, dan sulit ditanami padi.

Mencermati potensi Madura nasibnya hampir mirip dengan Papua. Betapa tingkat kesejahteraan warga di kedua daerah kurang beruntung di tengah kelimpahan sumber daya alam (SDA)-nya, celaknya justru dikelola oleh (asing) swasta. Di Papua ada emas, gas, bahkan menyimpan (ditemukan) uranium, namun SDA dimaksud dalam cengkeraman asing (Amerika dan Cina). Demikian pula Madura, meskipun di pulau garam (istilah lain Madura) terdapat geliat *offshore* dan *onshore*, toh dikelola oleh swasta asing pula.

⁴¹ <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1366> diunduh pada tanggal 21 Maret 2017 jam 15.00

Persoalan berkenaan dengan potensi migas Madura, adalah berkenaan dengan ada dugaan migas Madura telah dikuasai perusahaan multinasional (perusahaan asing). Menurut Saiful, Wakil Ketua Yayasan Ario Danurwendo, yayasannya masyarakat Giligenting, bahwa penguasaan asing terhadap potensi migas Madura hampir 90 %. “Saya kira hanya 10 persen saja yang dikuasai (dikelola) oleh perusahaan lokal (Nasional) dalam hal ini pihak Pertamina. Selebihnya, potensi migas Madura dikuasai asing, mulai dari Santos, Medco, Kodeco, Petronas dan lainnya.”⁴²

Menurut para pengamat migas, potensi migas yang ditemukan (dieksploitasi) saat ini, belum apa-apa, baru sebagian kecil saja. Seperti di pulau Giligenting (Sumenep), kata Syarifudin, bukan hanya di Maleo I saja, tetapi ada sejumlah titik gas yang bisa dieksploitasi hingga 1500 tahun.

Menengok geliat para investor asing dari berbagai negara mengeksploitasi dan melakukan eksplorasi SDA di Madura, betapa sangat kontradiksi dengan imbal balik yang direguk oleh rakyat baik fisik maupun non fisik serta pembangunan sumberdaya manusianya sendiri.

b. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia di Madura tepatnya di empat kabupaten mempunyai potensi dalam perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan masyarakat mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam

⁴² mediamadura.com/tag/potens-madura/ diakses pada tanggal 30 Maret 2017 jam 21.00

untuk tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. SDM merupakan bagian dari sistem yang membentuk suatu organisasi masyarakat. Mayoritas mata pencaharian utama di madura berprofesi sebagai petani.

Seiring dengan perkembangan zaman, Sumber daya manusia (SDM) di madura dipandang bukan hanya sebagai sumber daya semata, melainkan merupakan modal atau aset bagi institusi dan organisasi yang ada di masyarakat. Di Madura sendiri ada beberapa orang yang telah mengembangkan potensi masyarakatnya untuk meningkatkan ekonomi lokal. Contohnya, di desa Tangkel kecamatan Bangkalan terdapat usaha pembuatan Kripik Pisang, jenis makanan yang bahan utamanya terbuat dari Pisang. Usaha tersebut telah memberdayakan masyarakat lokal sebagai pekerja dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Contoh lain, di desa margan toko terdapat sebuah kelompok tani yang memiliki usaha pada budidaya komoditas jagung. Usaha tersebut juga telah berjalan baik dan mampu memberdayakan masyarakatnya sebagai buruh tani.⁴³

Ada juga yang berprofesi sebagai peternak ayam dan itu juga dapat meningkatkan ekonomi lokal, dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat madura yang masih belum memiliki pekerjaan atau pengangguran.

Dari ketiga contoh di atas dapat diketahui bahwa masyarakat madura tepatnya di empat kabupaten telah berperan efektif sebagai mahluk

⁴³ newsmadura.com/bangkalan/.../madura-pulau-kecil-sejuta-potensi/ Diakses Pada Tanggal 0 Maret 2017 jam 23.00

sosial dan ekonomi yang dapat mengelola diri sendiri juga orang lain. Pengelolaan ini tentunya memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan potensi alam sekitar demi tercapainya kesejahteraan masyarakat madura pada umumnya.

D. Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: *“otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*.⁴⁴

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.⁴⁵ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-

⁴⁴ https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UU_12_2008.pdf
Diunduh pada tanggal 12 Maret 2017 Jam 17.00

⁴⁵ Nurcholis Hanif, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2007 hal 30

undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001 telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan Pemerintahan yang sentralistik-birokratis ke arah desentralistik-partisipatoris. UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggung jawab pada daerah kabupaten dan kota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan lebih jauh diharapkan akan menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah.⁴⁶

Lahirnya Undang-undang ini juga akan memberikan implikasi positif bagi dinamika aspirasi masyarakat setempat. Kebijakan daerah tidak lagi bersifat “given” dan “uniform” (selalu menerima dan seragam) dari pemerintah pusat, namun justru pemerintah daerah yang mesti mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi dan sosio-kultural masyarakat setempat.⁴⁷ Undang-undang ini juga membuka jalan bagi

⁴⁶ Syaukani HR, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm.233

⁴⁷ Ibid Hal 301

terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) di satu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Karena dengan otonomi, pemerintahan kabupaten/ kota memiliki kewenangan yang memadai untuk mengembangkan program-program pembangunan berbasis masyarakat (ekonomi rakyat). Jika selama ini program-program pemberdayaan ekonomi rakyat didisain dari pusat, tanpa daerah memiliki kewenangan untuk “berkreasi”, sekaranglah saatnya pemerintah daerah kabupaten/kota menunjukkan kemampuannya. Tantangan, bahwa daerah mampu mendisain dan melaksanakan program yang sesuai dengan kondisi lokal patut disikapi dengan kepercayaan diri dan tanggung jawab penuh.⁴⁸

Lebih lanjut UU No.5 Tahun 1974 mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu menurut UU No.22 Tahun 1999 mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah direvisi kembali UU No.22 Tahun 1999 berubah menjadi UU No.32 Tahun 2004 yang menyatakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Dari berbagai rumusan otonomi daerah diatas maka otonomi daerah adalah kewenangan dan kemandirian daerah otonom untuk

⁴⁸ Ibid Hal 306

mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

1. Prinsip Otonomi Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.⁴⁹ Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan wewenang, tugas dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utam dari tujuan nasional.

⁴⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hlm.172

Seiring dengan prinsip itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervise, pengendalian koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

⁵⁰ Syaukani HR, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm.230

2. Faktor-faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah

Faktor-faktor lain yang dimaksud harus meliputi paling sedikit 5 kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi, dan paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan. Syarat Dalam Pembentukan Provinsi Merujuk pada PP 78/2007 ttg Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Pasal 4 aya 1 menyebutkan 3 syarat pembentukan wilayah administratif pemerintahan, termasuk wilayah provinsi meliputi⁵¹ :

a. Syarat administratif

Untuk daerah provinsi harus ada persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD Provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Untuk daerah kabupaten/kota harus ada persetujuan Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali kota yang bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

b. Syarat Teknis

Syarat teknis meliputi faktor yang mendukung pembentukan daerah otonom, mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

⁵¹<http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/DaftarSPM/PP%20Nomor%2078%20Tahun%202007.pdf>Diakses pada Tanggal 13 Agustus 23.00 WIB

c. Syarat Fisik

Secara fisik, meliputi paling sedikit 5 kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi dan paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan daerah Kabupaten, serta paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan daerah kota, lokasi calon ibu kota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

3. Pemekaran Daerah Sebagai Implikasi Otonomi Daerah

Munculnya Undang-undang otonomi daerah merupakan salah satu usaha untuk di satu pihak “mendinginkan” euforia reformasi dan di lain pihak untuk menjaga keutuhan NKRI. Oleh karena itu, isi dari UU No.22 Tahun 1999 tersebut lebih memberikan kebebasan yang nyata dan seluas-luasnya bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri demi untuk kesejahteraan daerahnya sendiri-sendiri. Era reformasi yang dimulai dari tahun 1998 telah menggeser paradigma desentralisasi administratif, yang dianut pada masa orde baru, menjadi desentralisasi politik pasca UU No.22 Tahun 1999.⁵²

Pemekaran wilayah/ daerah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di era reformasi merupakan konsekuensi logis dari penerapan kebijakan desentralisasi politik oleh pemerintah pusat di daerah. Dengan desentralisasi politik maka pemerintah pusat membentuk daerah-daerah otonom atau daerah-daerah yang mempunyai pemerintahan, yaitu daerah-daerah yang mempunyai wilayah, masyarakat hukum, kepala daerah, dan anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat, pegawai, dan kewenangan serta keleluasaan mengatur dan

⁵² Yuswanto, *Hukum Desentralisasi Keuangan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.11

mengurus daerah.⁵³ Kebijakan pemekaran daerah pasca ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai perbedaan yang signifikan jika dibandingkan pengaturan pemekaran daerah berdasar UU No.5 Tahun 1974 (orde baru).⁵⁴

Pelaksanaan kebijakan pemekaran daerah pada orde baru, bersifat elitis dan memiliki karakter sentralistik, dimana perencanaan dan implementasi pemekarannya lebih merupakan inisiatif pemerintah pusat ketimbang partisipasi dari bawah. Proses pemekaran daerah seringkali menjadi proses yang tertutup dan menjadi arena terbatas di kalangan pemerintah pusat.⁵⁵

Pada orde baru, kebijakan pemekaran lebih bersifat elitis dan sentralistik. Namun pada masa itu pemerintah telah mencoba mendorong upaya penyiapan infrastruktur birokrasi (bukan infrastruktur politik) sebelum pembentukan daerah otonom. Masa transisi teknokratis disiapkan sedemikian rupa sebelum menjadi Daerah Otonomi Baru. Dalam masa transisi, pembentukan daerah baru ini lebih menekankan pada mekanisme teknokratis daripada mekanisme politik, seperti penyiapan administrasi birokrasi, infrastruktur, gedung perkantoran, dan sebagainya. Setelah penyiapan teknokratis dirasa cukup barulah kemudian penyiapan politik dilakukan yaitu dengan pembentukan DPRD, dari situ barulah kemudian dibentuk DOB.⁵⁶

⁵³ Eko. Prasajo, 2008. "Jorjoran Pemekaran Daerah: Instrumen Kepentingan Ekonom Politik". Dalam Jurnal Spirit Publik Volume 1 No 7 Tahun 2011 Hal 112

⁵⁴ Ibid. Hal 90

⁵⁵ Ibid. Hal 93

⁵⁶ Pratikno. 2008. "Usulan Perubahan Kebijakan Penataan Daerah (Pemekaran dan Penggabungan Daerah)". Dalam Jurnal Spirit Publik Volume 1 No 7 Tahun 2011 hal 05

Di masa era reformasi sekarang, proses-proses penyiapan teknokratis tersebut pada kebijakan pemekaran daerah berdasar UU No. 22 Tahun 1999 tidak ada, tetapi justru lebih menekankan pada proses-proses politik. Ruang bagi daerah untuk mengusulkan pembentukan DOB dibuka lebar oleh kebijakan pemekaran daerah berdasar UU No. 22 Tahun 1999. Dengan kebijakan yang demikian ini, kebijakan pemekaran daerah sekarang lebih didominasi oleh proses politik daripada proses teknokratis.

Perlu ditambahkan bahwa daerah otonom yang sudah terbentuk dapat dihapus atau digabung dengan daerah lain jika daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.

E. Desentralisasi

Desentralisasi⁵⁷ Adalah azas penyelenggara pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (*local government*), adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih (pemerintah lokal), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Asas Otonomi adalah prinsip

⁵⁷ Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan daerah.

Menurut Rismawandha dalam Desentralisasi merupakan konsekuensi dari demokratisasi. Tujuannya adalah membangun good governance mulai dari akar rumput politik. Beberapa kasus semisal penolakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati dan Tindakan KKN Bupati, yang oleh sementara kalangan dinilai sebagai dampak negatif dari hiper-demokratisasi, berimbas buruk terhadap pelaksanaan program otonomi daerah, yang merupakan realisasi dari ide desentralisasi.⁵⁸

F. Penelitian terdahulu

Skripsi Dengan Judul “Pemekaran Wilayah Bone Selatan” Penulis Saiful Anwar Ilmu Politik Pada Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2014.⁵⁹ Meneliti tentang Proses dan pengaruh dari pemekaran wilayah Bone Selatan untuk memberikan pelayanan yang baik sekaligus peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat Bone Selatan seperti yang masyarakat Bone Selatan suarkan. Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang pemekaran wilayah. Perbedaannya ialah pada penelitian tersebut membahas proses dan

⁵⁸ Syamsuddin Haris (Ed.) (2007). Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Jakarta, LIPI Press. Hal 39

⁵⁹ Saiful Anwar, “Pemekaran Wilayah Bone Selatan” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

pengaruh pemekaran, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat.

Skripsi Dengan Judul “Studi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan masyarakat Di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali” Penulis Hasriani Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univesitas Halu Oleo Kendari 2016.⁶⁰ Meneliti pemekaran desa cukup memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali hal ini ditunjukan dengan nilai skor keseluruhan rata-rata 3,47. Dampak dari pemekaran desa ini dapat dilihat dari jumlah ketersediaan sarana sosial dan ekonomi yaitu dari aspek pendidikan, kesehatan dan sarana jalan yang cukup meningkat dari tahun sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran. Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas pemekaran wilayah. Perbedaannya ialah pada penelitian tersebut membahas tentang dampak pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat.

Skripsi Dengan Judul “Politik Pemekaran Studi Kasus Proses Pembentukan Kota Tangerang” Penulis Mohammad Rifki Pratama Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1431H/2010M.⁶¹ Penulis menjelaskan bahwa pemekaran wilayah adalah sesuatu yang memiliki tujuan penting bagi sebuah daerah dalam

⁶⁰ Hasriani, “Studi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan masyarakat Di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univesitas Halu Oleo Kendari, 2016).

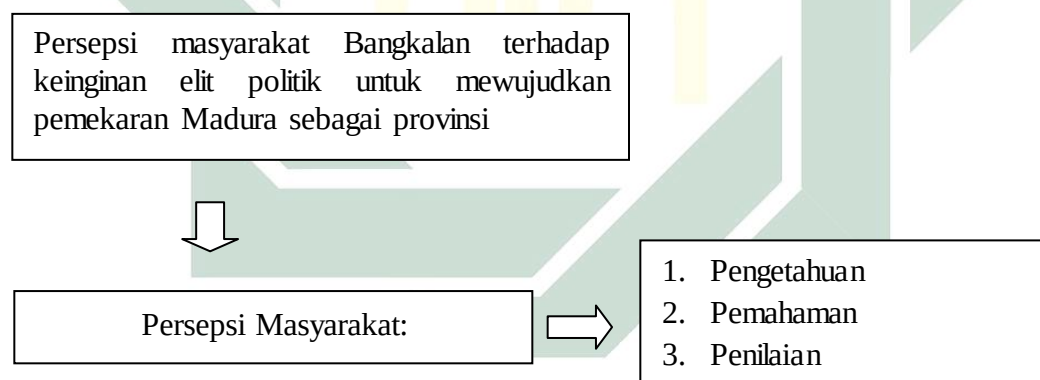
⁶¹ Mohammad Rifki Pratama, “Politik Pemekaran Studi Kasus Proses Pembentukan Kota Tangerang” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

suatu negara, baik secara teori maupun secara praktiknya. Dalam ilmu politik ada hal yang lebih penting dari pada memikirkan bagaimana cara berkuasa, bagaimana melakukan kesejahteraan sosial kepada seluruh rakyat begitu juga dalam menegajawantahkan azas demokrasi, yang mengembalikan segala sesuatu pada rakyat. Dalam Skripsi ini juga membahas pemekaran kota Tangerang. Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas pemekaran wilayah. Perbedaannya ialah pada penelitian tersebut membahas tentang politik pemekarannya, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat tentang pemekaran wilayah.

G. Kerangka Berpikir

Tabel: 2.1

Kerangka berpikir



Keterangan:

1. Pengetahuan masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik untuk mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi.

2. Pemahaman masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik untuk mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi.
3. Penilaian masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik untuk mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi.

H. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata *hypo* yang berarti *di bawah* dan *thesa* yang berarti kebenaran. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman simpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji kebenarannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.⁶² Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan hipotesis yang menggambarkan karakter sebuah kelompok atau variabel tanpa menghubungkannya dengan variabel yang lain. Hipotesis deskriptif juga berfungsi untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai sample penelitian.⁶³ Sehingga dalam penelitian ini hipotesis deskriptif digunakan untuk menggambarkan persepsi masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi.

⁶² Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Ed. Revisi 2. Cet. 4. (Jakarta:Rajawali Pers, 2014). Hal. 67.

⁶³ *Ibid*, Hal. 72

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Didalam Penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Metode penelitian kuantitatif juga diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan menggunakan instrument penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, Kuantitatif metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial.⁶⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah statistik diskriptif. Statistik adalah suatu ilmu sekaligus metode yang mempelajari cara-cara mengumpulkan data untuk dapat di deskriptifkan dan diolah, kemudian dianalisis dalam rangka membuat kesimpulan, agar dapat ditentukan keputusan yang akan diambil berdasarkan data yang dimiliki.

Pengertian dari metode deskriptif menurut Sugiyono⁶⁵ adalah Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Al-Fabeta, 2010), 7-8.

⁶⁵ Ibid, 8

penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan dalam Menganalisa persepsi masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi. sehingga dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.

B. Objek Penelitian

1. Populasi

Dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti yang kemudian ditarik kesimpulannya⁶⁶. Sedangkan menurut Juliansyah Noor dalam bukunya menyebutkan bahwa populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan dari objek penelitian⁶⁷.

Sementara yang menjadi Populasi adalah wilayah madura yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi menggambarkan berbagai karakteristik subjek penelitian untuk kemudian menentukan pengambilan sampel. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penentuan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Madura yang tinggal di kabupaten Bangkalan dan tercantum dalam Daftar pemlih tetap (DPT KPU).

⁶⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung:Al-Fabeta, 2012), 49

⁶⁷ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian:Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta:Kencana, 2011), 147

Jumlah Penduduk kabupaten Bangkalan Tahun 2014 sesuai rilis dari Komisi Pemilihan Umum(KPU) Bangkalan sebanyak⁶⁸:

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk PerKecamatan yang terdaftar sebagai Pemilih tetap

NO	KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
01	BANGKALAN	32.161	33.892	66.053
02	SOCAN	24.324	26.610	50.934
03	BURNEH	30.621	31.58	62.379
04	KAMAL	21.450	23.109	44.559
05	AROSBAYA	21.116	21.577	42.693
06	GEGER	34.241	35.184	69.425
07	KLAMPIS	22.289	25.258	47.547
08	SEPULU	21.980	23.864	45.844
09	TANGJUNGBUMI	21.350	22.316	43.666
10	KOKOP	30.189	30.075	60.264
11	KWANYAR	22.669	24.467	47.136
12	LABANG	17.876	19.559	37.435
13	TANAMIRAH	38.376	38.940	77.316
14	TRAGAH	14.761	16.461	31.222
15	BLEGA	28.717	30.359	59.076
16	MODUNG	20.628	23.154	43.782
17	KONANG	26.855	27.969	54.824
18	GALIS	39.019	39.860	78.879
	TOTAL	468.622	494.412	963.034

Sumber: KPU Bangkalan

Dalam tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan populasi sebesar **963.034** Orang dan tinggal di Kabupaten Bangkalan. yang dibagi perkecamatan dan data tersebut diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum(KPU) Bangkalan.

2. Sampel

⁶⁸<http://kpu-bangkalankab.go.id/bkl/wp-content/uploads/2016/05/dpt-pilpres-2014-1.jpg>
dilihat tanggal 18 Januari 2017 jam 21.56 WIB

Sampel adalah sebagian dari populasi⁶⁹. Dikarenakan populasi sangat besar maka tidak memungkinkan peneliti untuk mempelajari semuanya. Sehingga karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk diberlakukan kesemua populasi⁷⁰.

Dalam penelitian ini populasi berjumlah **963.034** Penduduk kabupaten Bangkalan. Maka untuk menghitung besarnya sampel dari populasi tersebut, peneliti menggunakan rumus yang dikemukakan oleh *slovin* sebagai berikut⁷¹:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{963.034}{1 + 963.034 \cdot (10\%)^2} = 99,98 \text{ Dibulatkan menjadi } 100 \text{ Responden}$$

Keterangan:

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah anggota populasi

e = *Error Level* (tingkat kesalahan) dalam penelitian ini ditetapkan 10%

Bedasarkan penghitungan sampel dengan rumus *slovin* diatas, diketahui jumlah sampel peneliti adalah 100 responden. Sampel diatas diklasifikasikan berdasarkan Penduduk Komisi Pemilihan Umum(KPU) Bangkalan.

⁶⁹ Saiffudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), 79.

⁷⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung:Alfabeta, 2012), 116.

⁷¹ Husein Umur, *Metode penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 1996), 78.

Sedangkan untuk menghitung jumlah sampel dari tiap-tiap Kecamatan yang ada di kabupaten bangkalan maka peneliti menggunakan rumus prosentase $P = F/N \times n$.

Keterangan:

P = Jumlah responden/sampel dari Penduduk setiap Kecamatan

F = Frekuensi atau total responden

N = Populasi

n = Jumlah Sampel

Adapun rincian hasil penghitungan sampel diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2

Rincian penghitungan sampel

NO	KECAMATAN	JUMLAH	PENGAMBILAN SAMPEL	JUMLAH RESPONDEN
01	BANGKALAN	66.053	66.053/963.034X100	7
02	SOCAL	50.934	50.934/963.034X100	5
03	BURNEH	62.379	62.379/963.034X100	6
04	KAMAL	44.559	44.559/963.034X100	5
05	AROSBAYA	42.693	42.693/963.034X100	5
06	GEGER	69.425	69.425/963.034X100	7
07	KLAMPIS	47.547	47.547/963.034X100	5
08	SEPULU	45.844	45.844/963.034X100	5
09	TANGJUNGBUMI	43.666	43.666/963.034X100	5
10	KOKOP	60.264	60.264/963.034X100	6
11	KWANYAR	47.136	47.136/963.034X100	5
12	LABANG	37.435	37.435/963.034X100	4
13	TANAMIRAH	77.316	77.316/963.034X100	8
14	TRAGAH	31.222	31.222/963.034X100	3
15	BLEGA	59.076	59.076/963.034X100	6
16	MODUNG	43.782	43.782/963.034X100	4
17	KONANG	54.824	54.824/963.034X100	6
18	GALIS	78.879	78.879/963.034X100	8
	TOTAL	963.034	-	100

Dalam tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah sampel jika diklasifikasikan berdasarkan Kecamatan ialah sebagai berikut, bangkalan (66.053 penduduk), socah (50.934 penduduk), burneh (62.379 penduduk), kamal (44.559 penduduk), arosbaya (42.693 penduduk), geger (69.425 penduduk), klampis (47.547 penduduk), sepulu (45.844 penduduk), tangjung bumi (43.666 penduduk), kokop (60.264 penduduk), kwanyar (47.136 penduduk), labang (37.435), tanamirah (77.316 penduduk), tragah (31.222 penduduk), blega (59.076 penduduk), modung (43.782 penduduk), konang (54.824 penduduk), galis (78.879 penduduk). Adapun teknis pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik *Simple Random Sampling* yaitu teknik yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.⁷²

C. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sebagian data literatur dan ditunjang dengan beberapa data dari lapangan berupa data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari responden penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber

⁷² Sugiono. *Metode Penelitian...* hal 82

informasi yang dicari⁷³. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data langsung yang diperoleh dari pengisian angket yang dilakukan oleh responden yang berkaitan dengan persepsi masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya⁷⁴. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang sudah tersedia. Sumber data sekunder diperoleh dari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku, jurnal, artikel, koran, online, browsing data internet, dan berbagai dokumentasi pribadi maupun resmi. Sehingga sumber data ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer, seperti data jumlah Penduduk kabupaten Bangkalan yang diperoleh dari website Komisi Pemilihan Umum(KPU) Bangkalan

2. Jenis Data

Berangkat dari judul penelitian ini, maka penelitian ini jenis data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Data Kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka.⁷⁵ Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori

⁷³ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Paustaka Pelajar, 2010), 91.

⁷⁴ Ibid. 91

⁷⁵ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung:Penerbit Alfabeta, 2013), 67.

Persepsi Masyarakat, Elit Politik, Konsep Desentralisasi, Konsep Pemekaran Wilayah, Otonomi daerah.

- b. Data Kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka⁷⁶. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah responden dan hasil rekapitulasi angket yang akan diisi oleh responden. Angket ini berisi tentang Persepsi Masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik tentang Pemekaran Madura sebagai Provinsi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian⁷⁷. Adapun teknik yang digunakan meliputi tiga hal, yaitu:

1. Observasi (pengamatan)

Merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri yang spesifik dibandingkan dengan wawancara dan kuisioner. Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian⁷⁸. Tujuan dilakukannya observasi oleh peneliti adalah untuk menyajikan gambaran nyata mengenai persepsi masyarakat terhadap Kebijakan elit politik tentang Pemekaran madura sebagai provinsi dengan dibuktikan melalui dokumentasi yang didapat oleh peneliti. Observasi

⁷⁶ Abdul Muhid, *Analisis Statistik 5 Langkah Praktis Analisis Statistik Dengan SPSS For Windows*. (Sidoarjo:Zitama, 2012), 2.

⁷⁷ Juliansyah Noor. 2011. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta Kencana. 138

⁷⁸ Sugiono, *Metode Penelitian...*, 145.

diperoleh langsung dari pengamatan peneliti pada beberapa penduduk dikabupaten bangkalan.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner (angket) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi daftar pertanyaan yang tertulis kepada responden untuk dijawab⁷⁹. Penyebaran angket tersebut peneliti lakukan untuk mendapatkan data tentang persepsi Masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk Validasi data dalam penelitian ini. Penggunaan dokumentasi pada penelitian ini untuk memperoleh kevalidan data dan mengukur kelayakan data untuk mengetahui persepsi masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi, hal-hal yang berkaitan dengan dokumentasi adalah seperti jumlah penduduk sekabupaten bangkalan dan jumlah penduduk perkacamatan maupun literatur yang semua didapatkan dari berbagai sumber mulai dari buku, jurnal, skripsi, internet maupun berbagai literatur yang menunjang.

E. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti

⁷⁹ Ibid., 142.

sudah diperoleh secara lengkap. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis statistik diskriptif dengan rumus persentase $P = F/N \times n$.

Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini digunakan untuk menjawab Rumusan masalah bagaimana persepsi masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi. Data yang diperoleh dari angket dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu: mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya, membuat tabulasi data dan dianalisis menggunakan aplikasi SPSS versi 16.0.

Dalam analisis data dilakukan pengumpulan data dengan menentukan skor responden sesuai dengan penskoran yang ditentukan selanjutnya menjumlah skor tersebut. Untuk menentukan skor (*deskriptif persentase*) digunakan cara sebagai berikut:

- a. Apabila responden menjawab (a) diberi skor 4
- b. Apabila responden menjawab (b) diberi skor 3
- c. Apabila responden menjawab (c) diberi skor 2
- d. Apabila responden menjawab (d) diberi skor 1

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Kabupaten Bangkalan

Berkaitan dengan wacana pemekaran Madura sebagai provinsi oleh elit politik, kabupaten Bangkalan menjadi salah satu kabupaten yang tepat untuk menyuarakan pemekaran. Selain menjadi satu-satunya daerah di pulau Madura yang wilayah administrasinya dekat dengan wilayah provinsi Jawa Timur, kabupaten Bangkalan juga menjadi pintu utama aktivitas lalu lintas masyarakat Madura ke pulau Jawa menggunakan jembatan Suramadu (Surabaya-Madura). Kondisi ini menciptakan sepanjang jalur tersebut ramai dengan aktivitas masyarakat. Dengan kondisi jalur yang ramai, kabupaten Bangkalan menjadi salah satu lokasi strategis untuk mensosialisasikan wacana pemekaran kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat Madura yang akan merasakan dampak dari kebijakan pemekaran ini.

Secara geografis posisi kabupaten Bangkalan dibatasi oleh Laut Jawa disebelah utara, Kabupaten Sampang disebelah timur dan Selat Madura disebelah selatan dan barat. Kabupaten Bangkalan terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas 273 desa dan 8 kelurahan.⁸⁰ Pusat pemerintahan di Kecamatan Bangkalan. Kabupaten Bangkalan memiliki topografi datar hingga berbukit dengan sebagian besar wilayahnya telah digunakan untuk kegiatan

⁸⁰ Kabupaten Bangkalan, <http://www.bangkalankab.go.id/v4/>. “Profil Kabupaten Bangkalan” (Minggu, 04 Februari 2018).

persawahan (pertanian). Potensi sumber daya alamnya meliputi beberapa sektor yaitu pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan serta sektor pariwisata, merupakan produk – produk andalan dan investasi yang sangat potensial bagi Kabupaten Bangkalan.

Perkebunan yang ada di Kabupaten Bangkalan hanya perkebunan campuran dan perkebunan jenis kelapa, jambu mente, kapuk randu, siwalan, pinang, cabe jamu dan sebagainya. Luas areal yang paling kecil terdapat pada jenis tanaman cengkeh. Jika dilakukan penilaian terhadap jumlah rata-rata produksinya paling besar terdapat pada jenis tanaman yang arealnya paling besar seperti kelapa.

Sedangkan untuk jenis usaha pertambangan dan galian dibedakan menjadi 7 jenis yaitu : batu bara, minyak dan gas bumi, bijih logam, batubatuan, tanah liat dan pasir, mineral bahan galian dan sebagainya. Pertambangan dan bahan galian di Kabupaten Bangkalan yang terutama adalah pasir dan batu gunung. Tempat pengambilan pasir terdapat di Kecamatan Burneh, Kwanyar, Arosbaya, Modung dan Tanjung Bumi. Sedangkan pengambilan batu gunung di Kecamatan Blega, Galis, Kamal, Socah, Arosbaya, Geger, Kokop, Konang dan Tragah.

Sementara untuk lokasi penelitian di kabupaten Bangkalan, dilakukan di 18 Kecamatan yang meliputi: kecamatan Arosbaya, kacamatan Bangkalan, kacamatan Blega, kacamatan Burneh, kacamatan Galis, kacamatan Geger, kacamatan Kamal, kacamatan Klampis, kacamatan Kokop, kacamatan Konang, kacamatan Kwanyar, kacamatan Labang, kacamatan Modung,

kacamatan Sepuluh, kacamatan Socah, kacamatan Tana Merah, kacamatan Tanjung Bumi, kacamatan Tragah.

Sedangkan untuk desa di tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Lokasi Penelitian

NO	KECAMATAN	DESA
01	BANGKALAN	KRATON
02	SOCAL	SOCAL
03	BURNEH	BURNEH
04	KAMAL	KAMAL
05	AROSBAYA	AROSBAYA
06	GEGER	GEGER
07	KLAMPIS	KLAMPIS BARAT
08	SEPULU	SEPULU
09	TANGJUNGBUMI	TANGJUNGBUMI
10	KOKOP	KOKOP
11	KWANYAR	KWANYAR BARAT
12	LABANG	LABANG
13	TANAMIRAH	TANAMIRAH DAJAH
14	TRAGAH	TRAGAH
15	BLEGA	BLEGA
16	MODUNG	MODUNG
17	KONANG	KONANG
18	GALIS	GALIS

Pengambilan desa di atas sebagai lokasi penelitian diambil dari desa yang menjadi pusat pemerintahan kecamatan, yaitu desa yang berada di kecamatan. Hal ini dilakukan karena masyarakat desa yang berada di kecamatan lebih mengetahui informasi pemekaran karena letak desanya yang berdekatan dengan pemerintahan kecamatan.

2. Sosial Politik Masyarakat Bangkalan

Untuk kondisi sosial politik masyarakat Bangkalan, umumnya masyarakat Madura, hal ini dapat dilihat dari dua kelompok masyarakat yang sama-sama memiliki pengaruh bagi masyarakat. Kelompok pertama adalah blater dan yang kedua adalah kelompok kiai.⁸¹ Di kalangan komunitas sosial orang Madura, kelompok kekerasan yang diwakili oleh blater mendapatkan “penghormatan” tersendiri dari masyarakat lantaran sosoknya yang dikenal sebagai orang jago, atau dalam bahasa Madura *angko*. Apabila ingin mendapatkan status sebagai blater, dia perlu menguasai ilmu bela diri atau pencak silat, penguasaan terhadap alat-alat kekerasan seperti clurit, calok, dan ilmu gaib lainnya yang dianggap memiliki fungsi kekebalan tubuh jika diserang dengan senjata tajam. Salah satu arena budaya untuk melegitimasi seseorang bisa disebut blater jika seseorang terlibat dalam peristiwa carok, yakni penyelesaian konflik dengan cara kekerasan, baik dengan motif membela harga diri maupun balas dendam. Arena budaya lain ialah kegiatan remoh dan kerapan sapi yang menjadi forum berkumpulnya para blater lintas desa, kecamatan, bahkan tingkat kabupaten untuk meneguhkan eksistensi satu sama lain. Maka tak heran, jika arena budaya tersebut kerap kali terdapat praktik perjudian dan minuman keras.

Disisi lain, masyarakat Madura dikenal juga sebagai masyarakat santri yang memiliki ketaatan tinggi terhadap agama Islam. Dalam sejarahnya, proses Islamisasi di Madura berlangsung dari atas dan bawah, yakni dari pihak

⁸¹ Abdur Rozaki, *Islam, Oligarki Politik, dan Perlawanan Sosial*. Cetakan: I. (Yogyakarta: SUKA Press dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016). 70.

kerajaan, jaringan ulama' atau kiai, dan para saudagar yang membawa pengaruh kesadaran keislaman di kalangan masyarakat. Sehingga, pemuka agama Islam, dalam hal ini ulama' atau kiai mendapatkan penghormatan tinggi dari masyarakat Madura lantaran sosoknya yang dianggap sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Itulah mengapa dalam kehidupan sosial masyarakat Madura, kiai mendapatkan posisi sentral sebagai sumber rujukan keagamaan. Sehingga tidak heran jika aktifitas keseharian masyarakat, berupa ritus dan hajatan sosial warga selalu melibatkan kiai, mulai dari ritus kelahiran, slametan, hingga kematian.

Dari penjelasan di atas, singkatnya, ada dua kelompok sosial yang mendapatkan "penghormatan" tinggi dari masyarakat Madura: yang pertama *blater*, sebagai representasi orang yang memiliki pengaruh kekerasan, yang kedua, kiai sebagai orang yang disimbolkan memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kharisma *blater* yang melahirkan otoritas sosial secara informal di dalam masyarakat di dasarkan pada kapasitas diri sebagai seorang jago, selain juga adanya penggunaan instrumentasi kekerasan dan jejaring dengan para jago lainnya. Sedangkan kiai melalui pola pembentukan *akhlakul karimah*, meletakkan dasar-dasar moralitas-kebajikan dalam pengajaran keagamaan sehingga memunculkan hegemoni sistem pemikiran yang melahirkan berbagai bentuk penghormatan di kalangan masyarakat Madura. Dengan demikian, kondisi sosial politik yang ada di Bangkalan tidak lepas kaitannya dari dua kelompok di atas. Maka tak heran jika kalangan elit politik

Bangkalan di kuasai oleh dua kelompok tersebut dan dipastikan disegani dan dihormati oleh masyarakat Bangkalan.

3. Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat Bangkalan

Kabupaten Bangkalan mempunyai banyak pesantren sehingga sering dijuluki “Daerah Seribu Pesantren”. Berbatasan dengan wilayah kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, yaitu Surabaya, namun kabupaten Bangkalan dikenal sebagai daerah yang tingkat pendidikan masyarakatnya rendah.⁸² Penyebabnya diantaranya ialah faktor ekonomi, budaya-agama, politik, sosial, ketenagakerjaan, sarana-prasarana, guru sampai ke faktor psiko sosial.

Salah satu parameter yang digunakan Pemerintah untuk mengukur keterdidikan adalah proporsi anak yang mengikuti pendidikan formal yaitu sekolah dan madrasah (berstandar kurikulum nasional) sampai dengan kelas terakhir dari program Wajib Belajar Sembilan tahun terhadap jumlah anak usia sekolah untuk tingkat tersebut. Ini merupakan parameter yang diturunkan dari sistem yang tidak sepenuhnya cocok untuk mengukur keterdidikan kelompok usia tersebut di Bangkalan. Hal ini karena cukup banyak anak-anak dari kelompok usia itu di Bangkalan yang mengikuti pendidikan tetapi dalam jalur pendidikan non-formal, seperti di madrasah diniyah (Madin) atau pesantren. Jika para santri atau siswa madin itu tidak mengikuti Paket Kesetaraan, maka tidak tercatat sebagai berpartisipasi dalam pendidikan

⁸² Makmuri Sukarno, Peneliti Pusat Kependudukan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. <http://kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/pendidikan/241-dik-hotomi-pendidikan-umum-versus-agama-dan-reproduksi-masyarakat-santri>. Diakses pada 17 Desember 2017.

menurut parameter “pendidikan formal” yang digunakan pemerintah. Oleh karena itu keikutsertaan dalam pendidikan sekolah dan madrasah berkurikulum pendidikan nasional (dikenal sebagai madrasah standard Depag) sebagai parameter untuk mengukur tingkat pendidikan di daerah ini terkesan ‘bias’ mengikuti ukuran yang ditentukan oleh pemerintah Pusat. Pemerintah berupaya meningkatkannya dengan melaksanakan pendidikan kesetaraan Paket A (setara SD/MI) dan Paket B (setara SMP/MTs) melalui penyelenggaraan PKBM di pesantren dan madin sebagai bentuk kemitraan antara negara dan masyarakat.

Pesantren dipandang oleh orang Bangkalan sebagai sistem pertahanan nilai sekaligus sebagai identitas lokal. Di jaman penjajahan dulu, ketika sistem persekolahan belum melakukan ekspansi yang luas, pondok pesantren merupakan satu-satunya wadah pendidikan di Bangkalan, tapi ketika sistem sekolah dikembangkan pemerintah, banyak masyarakat yang mulai meninggalkan pesantren. Karena sistem sekolah terbukti pada umumnya unggul dalam melayani ilmu-ilmu umum dan kejuruan, maka domain pendidikan di pondok pesantren yang tersisa tinggal pendidikan agama saja. Ini terbentuk akibat proses reduksi ideologis yang dipaksakan oleh pihak luar melalui ekspansi sekolah, yaitu bahwa domain pesantren hanya pendidikan agama saja.

Suatu hal yang disadari oleh para ulama sebagai bertentangan dengan tuntutan yang terkandung dalam Kitab Kuning sendiri. Namun karena keterpaksaan yang demikian, pesantren sebagai sistem pewarisan nilai

menjadi garis pertahanan terakhir bagi para ulama dan umat untuk mewariskan agama kepada generasi penerusnya. Oleh karena itu pesantren menjadi identitas kultural setempat, sedangkan sekolah sebagai hal yang juga perlu sebagai salah satu alat bagi anak untuk mencari nafkah kelak. Manifestasinya yang terlihat sampai sekarang adalah anak-anak pergi sekolah ke SD atau MI pada pagi hari, pulang jam sebelas siang untuk kemudian sore hari atau malamnya belajar di madin atau di pesantren.

B. Karakteristik Responden

Responden yang menjadi fokus pada penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan berbagai macam karakteristik, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan agama. Lebih jelasnya dari berbagai karakteristik responden tersebut akan disajikan dalam beberapa diagram lingkaran dibawah ini:

Gambar 4.1

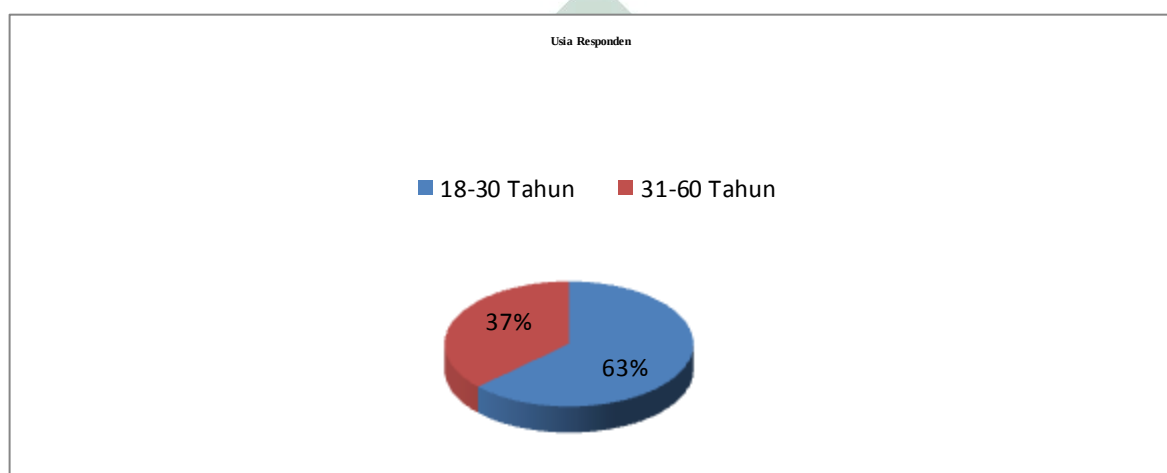
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Hasil Angket

Berdasarkan diagram lingkaran di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini bila diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin sangat didominasi oleh responden berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 68 (68%) responden. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan terdiri dari 32 (32%) responden.

Gambar 4.2

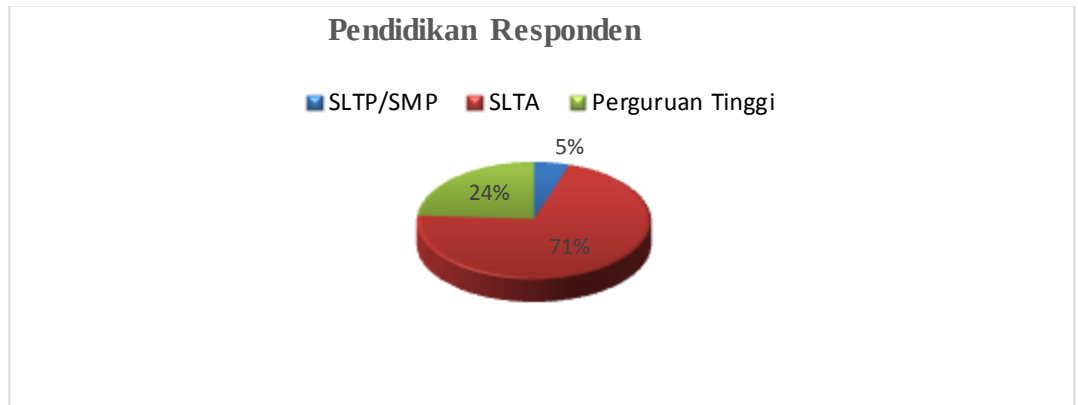


Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Sumber: Hasil Angket

Apabila dilihat pada diagram lingkaran di atas, dapat diketahui bahwa usia responden yang menjadi fokus pada penelitian ini didominasi oleh responden dengan rentang usia antara 18-30 dengan jumlah 63 (63%). Selanjutnya diikuti oleh rentang usia lebih Besar dari 31-60 Tahun sebanyak 37 (37%).

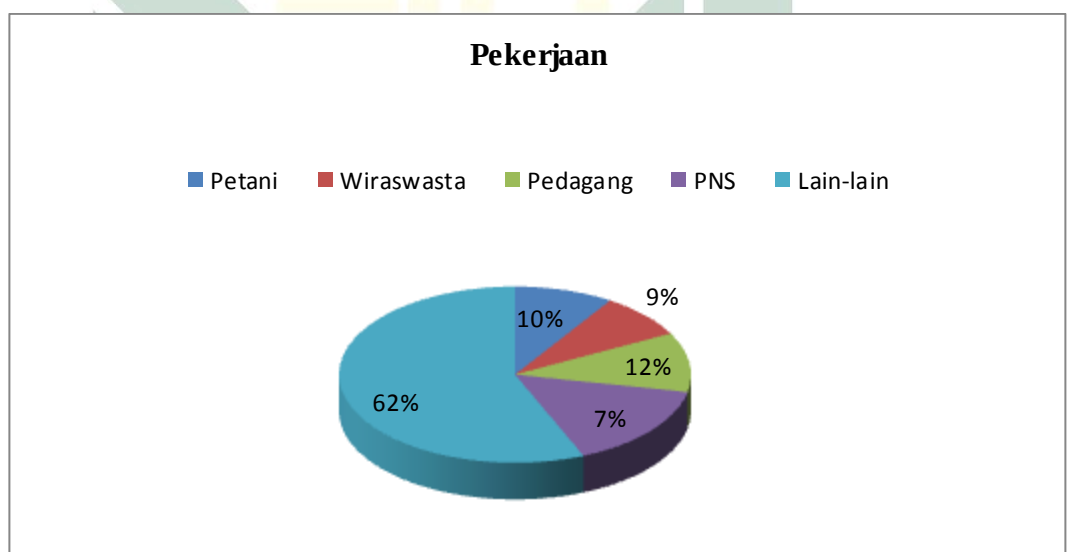
Gambar 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Hasil Angket

Pada diagram lingkaran di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden didominasi oleh lulusan SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas) dengan jumlah 71 (71%) responden. Kemudian sisanya dibagi menjadi lulusan Perguruan Tinggi, 24 (24%) responden, lulusan SLTP/SMP sebanyak 5 (5%) responden.

Gambar 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan



Sumber: Hasil Angket

Diagram lingkaran di atas, dapat dilihat dari jenis pekerjaan masyarakat yang menjadi responden pada penelitian ini Meliputi Petani 10 Responden (10%) Wiraswasta 9 Responden (9%), Pedagang 12 Responden (12%), PNS 7 Responden (7%) dan Lain-lain meliputi Pejabat Pemerintahan, tokoh agama, Guru Honorer, Aktivis LSM, Sebanyak 62 Responden (62%).

C. Penyajian Data Penelitian

Data ini diperoleh melalui penyebaran angket/ kuesioner yang diberikan kepada responden dengan jumlah sampel sebesar 100 responden dari populasi yang berjumlah 963.034. yang dianalisis dengan mengambil rumus slovin dengan margin *error* 10%. Angket/ kuesioner tersebut terdiri dari 10 butir pertanyaan tentang persepsi masyarakat terhadap kebijakan elit politik tentang pemekaran Madura sebagai provinsi. Persepsi masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi terdiri dari tiga indikator yaitu: *pertama* Pengetahuan masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi. *kedua* Pemahaman masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi. *ketiga* Penilaian masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi.

Setiap pertanyaan mempunyai 4 pilihan jawaban dan masing-masing jawaban dengan standar penilaian sebagai berikut:

- e. Apabila responden menjawab (a) diberi skor 4

- f. Apabila responden menjawab (b) diberi skor 3
- g. Apabila responden menjawab (c) diberi skor 2
- h. Apabila responden menjawab (d) diberi skor 1

Adapun Hasil angket dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Data Tentang Pengetahuan Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi.

- 1) Pengetahuan masyarakat Bangkalan dalam mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi.

Tabel 4.2

NO.	PENGETAHUAN MASYARAKAT	RESPONDEN	PROSENTASE
1.	Mengetahui	100	100%
2.	Kurang Mengetahui	0	0%
3.	Ragu-ragu	0	0%
4.	Tidak Mengetahui	0	0%
JUMLAH		100	100%

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden yang menjawab Mengetahui tentang wacana pemekaran Madura sebagai provinsi sebanyak 100 (100%) responden. Sedangkan yang menjawab Kurang Mengetahui sebanyak 0 (0%), Ragu-raru sebanyak 0 (0%), dan Tidak Tahu sebanyak 0 responden.

Pengetahuan masyarakat dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi diklasifikasikan berdasar karakteristik responden ialah sebagai berikut:

Tabel 4.3

klasifikasikan berdasar karakteristik responden

		Mengetahui		Kurang Mengetahui		Ragu-ragu		Tidak Mengetahui	
		Jmlh	Persen	Jmlh	Persen	Jmlh	Persen	Jmlh	Persen
Jenis Kelamin	Laki-laki	68	68%	0	0%	0	0%	0	0%
	Perempuan	32	32%	0	0%	0	0%	0	0%
Usia	18-30	63	63%	0	0%	0	0%	0	0%
	31-60	37	37%	0	0%	0	0%	0	0%
	>60	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pendidikan	SD	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	SMP	5	5%	0	0%	0	0%	0	0%
	SMA	71	71%	0	0%	0	0%	0	0%
	S1	24	24%	0	0%	0	0%	0	0%
Pekerjaan	Petani	10	10%	0	0%	0	0%	0	0%
	Wiraswasta	9	9%	0	0%	0	0%	0	0%
	Pedagang	12	12%	0	0%	0	0%	0	0%
	PNS	7	7%	0	0%	0	0%	0	0%
	Lain-lain	62	62%	0	0%	0	0%	0	0%

Pada tabel di atas diketahui bahwa masyarakat yang mengetahui dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi berdasarkan jenis kelaminnya didominasi oleh responden laki-laki yaitu sebanyak 68(68%) responden laki-laki dan 32(32%) responden perempuan. Pengetahuan masyarakat berdasarkan usianya didominasi oleh usia 18-30 tahun sebanyak 63 (63%) responden, sedangkan usia 31-60 tahun hanya 37 (37%) responden, dan tidak ditemukan responden yang berusia diatas 60 tahun. Berdasar pendidikannya didominasi oleh responden yang berpendidikan terakhir SMA yaitu 71(71%) dan sisanya 24 (24%) responden merupakan lulusan sarjana S1, 5(5%) responden SMP, dan 0 responden SD. Sedangkan yang terakhir berdasar pekerjaan responden didominasi oleh mereka yang memilih jawaban lain-lain yaitu sebanyak 62

(62%) responden dan 10 (10%) responden petani, 9 (9%) responden wiraswasta, 12 (12%) responden pedagang, dan 7 (7%) responden PNS.

- 2) Sumber Pengetahuan masyarakat bangkalan dalam mewujudkan Keinginan Wacana Pemekaran Madura Sebagai Provinsi.

Tabel 4.4

NO.	SUMBER	RESPONDEN	PROSENTASE
1.	Elit politik	1	1%
2.	Media (TV, Koran dan Media Online)	29	29%
3.	Saudara/ Teman	14	14%
4.	Banner/ Pamflet	56	56%
JUMLAH		100	100%

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden yang Mengetahui Kebijakan Pemekaran Madura sebagai Provinsi Dari elit Politik Sebanyak 1(1%) responden, Dari Media Sebanyak 29(29%) responden, Dari Diskusi atau Perbincangan Dengan Saudara, teman Sebanyak 14(14%) responden, dan Dari Media Banner/Pamflet Sebanyak 56(56%) responden.

Sedangkan sumber pengetahuan masyarakat bangkalan berdasar karakteristik responden ialah sebagai berikut:

Tabel 4.5

		Elit Politik		Media		Saudara/ Teman		Banner/ Pamflet	
		Jmlh	Persen	Jmlh	Persen	Jmlh	Persen	Jmlh	Persen
Jenis Kelamin	Laki-laki	1	1%	20	20%	5	5%	42	42%
	Perempuan	0	0%	9	9%	9	9%	14	14%
Usia	18-30	1	1%	16	16%	10	10%	36	36%
	31-60	0	0%	13	13%	4	4%	20	20%
	>60	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pendidikan	SD	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

Pekerjaan	SMP	0	0%	0	0%	2	2%	3	3%
	SMA	0	0%	16	16%	10	10%	45	45%
	S1	1	1%	13	13%	2	2%	8	8%
	Petani	0	0%	0	0%	4	4%	6	6%
	Wiraswasta	0	0%	4	4%	0	0%	5	5%
	Pedagang	0	0%	3	3%	1	1%	8	8%
	PNS	0	0%	5	5%	2	2%	0	0%
	Lain-lain	1	1%	17	17%	7	7%	37	37%

Berdasarkan data dari sumber pengetahuan responden dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi kebanyakan dari banner/pamflet. Untuk rincian responden ialah sebagai berikut: yang mengetahui dari banner berjenis kelamin laki-laki 42(42%) dan perempuan 14(14%). Berdasarkan usia didominasi usia 18-30 sebanyak 36(36%), usia 31-60 sebanyak 20(20%). Berdasarkan pendidikan didominasi oleh SMA 45 (45%), SMP 3 (3%), S1 8(8%). Berdasarkan pekerjaan didominasi oleh responden yang memilih pekerjaan lain-lain 37(37%). Petani 6(6%) wiraswasta 5(5%) pedagang 8(8%)

- 3) Waktu Mengetahui Masyarakat Bangkalan dalam mewujudkan Wacana Pemekaran Madura Sebagai Provinsi.

Tabel 4.6

NO.	Waktu	RESPONDEN	PROSENTASE
1.	Lebih Dari 1 Tahun	67	67%
2.	Kurang Dari 1 Tahun	33	33%
3.	Ragu-ragu	0	0%
4.	Tidak Tahu	0	0%
JUMLAH		100	100%

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden, 67(67%) Responden Menjawab lebih dari Satu tahun, 33(33%) responden menjawab kurang dari satu tahun mengetahui kebijakan ini. Sedangkan yang menjawab Ragu-ragu dan Tidak Tahu sebanyak 0(0%) responden.

Adapun waktu mengetahui masyarakat berdasar karakteristik responden ialah sebagai berikut:

Tabel 4.7

		>1 Tahun		<1 Tahun		Ragu-ragu		Tidak Tahu	
		Jmlh	Persen	Jmlh	Persen	Jmlh	Persen	Jmlh	Persen
Jenis Kelamin	Laki-laki	50	50%	18	18%	0	0%	0	0%
	Perempuan	17	17%	15	15%	0	0%	0	0%
Usia	18-30	40	40%	23	23%	0	0%	0	0%
	31-60	27	27%	10	10%	0	0%	0	0%
	>60	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pendidikan	SD	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	SMP	2	2%	3	3%	0	0%	0	0%
	SMA	47	47%	24	24%	0	0%	0	0%
	S1	18	18%	6	6%	0	0%	0	0%
Pekerjaan	Petani	4	4%	6	6%	0	0%	0	0%
	Wiraswasta	7	7%	2	2%	0	0%	0	0%
	Pedagang	7	7%	5	5%	0	0%	0	0%
	PNS	7	7%	0	0%	0	0%	0	0%
	Lain-lain	42	42%	20	20%	0	0%	0	0%

Sementara dari waktu pengetahuan masyarakat, didominasi oleh masyarakat yang telah mengetahui lebih dari 1 tahun yaitu sebanyak 50 (50%) responden laki-laki dan 17 (17%) responden perempuan. Dari karakteristik usia sebanyak 40 (40%) responden usia 18-30 dan 27 (27%) responden usia 31-60 tahun. Untuk pendidikan, SMP 2 (2%) responden, SMA 47 (47%) responden dan 18 (18%) responden S1. Sementara dari pekerjaannya 4 (4%) responden petani, 7 (7%) wiraswasta, 7 (7%)

pedagang, 7 (7%) PNS dan 42 (42%) responden yang memilih pekerjaan lain-lain, telah mengetahui wacana ini lebih dari 1 tahun.

- 4) Peran Elit Politik dalam Mensosialisasikan Keinginan Pemekaran Madura sebagai Provinsi

Tabel 4.8

NO.	ADANYA SOSIALISASI	RESPONDEN	PROSENTASE
1.	Ada	12	12%
2.	Ragu-ragu	0	0%
3.	Tidak Tahu	0	0%
4.	Tidak Ada	88	88%
JUMLAH		100	100%

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden yang menjawab ADA sebanyak 12(12%)responden. Yang menjawab Ragu-ragu dan Tidak Tahu sebanyak 0 responden. Sedangkan, yang menjawab TIDAK ADA sebanyak 88 (88%)responden.

Sementara peran elit politik dalam mensosialisasikan menurut karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 4.9

		Ada		Ragu-ragu		Tidak Tahu		Tidak Ada	
		Jmlh	Persen	Jmlh	Persen	Jmlh	Persen	Jmlh	Persen
Jenis Kelamin	Laki-laki	6	6%	0	0%	0	0%	62	62%
	Perempuan	6	6%	0	0%	0	0%	26	26%
Usia	18-30	8	8%	0	0%	0	0%	55	55%
	31-60	4	4%	0	0%	0	0%	33	33%
	>60	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pendidikan	SD	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	SMP	0	0%	0	0%	0	0%	5	5%
	SMA	6	6%	0	0%	0	0%	65	65%
	S1	6	6%	0	0%	0	0%	18	18%
Pekerjaan	Petani	0	0%	0	0%	0	0%	10	10%
	Wiraswasta	3	3%	0	0%	0	0%	6	6%
	Pedagang	0	0%	0	0%	0	0%	12	12%
	PNS	0	0%	0	0%	0	0%	7	7%

	Lain-lain	9	9%	0	0%	0	0%	53	53%
--	-----------	---	----	---	----	---	----	----	-----

Berdasarkan tabel di atas tentang sosialisasi yang dilakukan oleh elit politik, didominasi oleh responden yang menjawab tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh elit politik dari pada yang menjawab ada sosialisasi. Berikut rincian berdasar jenis kelamin: 62 (62%) responden laki-laki dan 26 (26%) responden perempuan. Berdasar usia: 55(55%) responden usia 18-30 tahun dan 33 (33%) responden usia 31-60 tahun. Berdasar pendidikan: 5 (5%) SMP, 65 (65%) SMA, dan 18 (18%) responden S1. Berdasar pekerjaan: 10(10%) petani, 6(6%) wiraswasta, 12 (12%) pedagang, 7 (7%) PNS, dan responden dengan pekerjaan lain-lain sebanyak 53 (35%) responden.

5) Kuantitas Sosialisai yang dilakukan oleh Elit Politik.

Tabel 4.10

NO.	Proses Sosialisasi	RESPONDEN	PROSENTASE
1.	Sangat Sering	0	0%
2.	Sering	0	0%
3.	Jarang	12	12%
4.	Tidak Pernah	88	88%
JUMLAH		100	100%

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden yang menjawab tidak pernah ada sosialisasi sebanyak 88 (88%) Responden, Menjawab jarang 12 (12%) responden sedangkan menjawab sering dan sangat sering 0 Responden.

Sedangkan kuantitas sosialisasi yang dilakukan oleh elit politik berdasarkan karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 4.11

		Sangat Sering		Sering		Jarang		Tidak Pernah	
		Jmlh	Persen	Jmlh	Persen	Jmlh	Persen	Jmlh	Persen
Jenis Kelamin	Laki-laki	0	0%	0	0%	6	6%	62	62%
	Perempuan	0	0%	0	0%	6	6%	26	26%
Usia	18-30	0	0%	0	0%	8	8%	55	55%
	31-60	0	0%	0	0%	4	4%	33	33%
	>60	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pendidikan	SD	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	SMP	0	0%	0	0%	0	0%	5	5%
	SMA	0	0%	0	0%	5	5%	66	66%
	S1	0	0%	0	0%	7	7%	17	17%
Pekerjaan	Petani	0	0%	0	0%	0	0%	10	10%
	Wiraswasta	0	0%	0	0%	3	3%	6	6%
	Pedagang	0	0%	0	0%	0	0%	12	12%
	PNS	0	0%	0	0%	0	0%	7	7%
	Lain-lain	0	0%	0	0%	9	9%	53	53%

Begitu pula dengan kuantitas sosialisasi yang dilakukan oleh elit politik. Banyak responden yang menjawab tidak pernah ada sosialisasi. Tingkat keseringan ini dapat dilihat dari jenis kelamin responden yaitu sebanyak 62(62%) responden laki-laki dan 26(26%) responden perempuan yang menjawab tidak pernah. Dari usia responden sebanyak 55(55%) responden usia 18-30 tahun dan 33(33%) responden dari usia 31-60 tahun. Dari pendidikannya yaitu 5(5%) responden SMP, 66 (66%) responden SMA, dan 17(7%) responden dari S1. Sementara dari pekerjaannya, petani 10 (10%) responden, wiraswasta 6(6%), pedagang 12 (12%), PNS 7 (7%) dan pekerjaan lain-lain sebanya 53(53%) responden. Semua responden tersebut menjawab tidak pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh elit

politik. Dari hasil angket di atas dapat diketahui persentase dari indikator variabel.

Selanjutnya dari hasil angket di atas dapat diketahui total skor indikator pengetahuan dari masing-masing responden dan selanjutnya dikategorikan sebagai berikut:

Skor Rentang 16 – 20 di katagorikan Sangat Baik (SB)

Skor Rentang 11 – 15 di katagorikan Baik (B)

Skor Rentang 6 – 10 di katagorikan Tidak Baik (TB)

Skor Rentang 1 – 5 di katagorikan Sangat Tidak Baik (STB)

Berikut adalah tabel data hasil angket

Tabel 4.12
Hasil Angket Indikator Pengetahuan Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura sebagai Provinsi

Pengetahuan Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura sebagai Provinsi							
NO	Pengetahuan					Total	Ket
	1	2	3	4	5		
1	4	1	4	3	1	11	B
2	4	1	4	3	1	11	B
3	4	1	4	3	1	11	B
4	4	1	4	3	1	11	B
5	4	1	4	3	1	11	B
6	4	1	4	3	1	11	B
7	4	1	3	1	1	10	TB

NO	Pengetahuan					Total	Ket
	1	2	3	4	5		
51	4	1	3	3	1	10	TB
52	4	1	4	3	1	11	B
53	4	1	4	3	1	11	B
54	4	1	4	3	1	11	B
55	4	3	4	3	1	13	B
56	4	3	4	3	1	13	B
57	4	1	4	3	1	11	B

8	4	2	3	3	1	11	B
9	4	1	4	3	1	11	B
10	4	1	4	3	1	11	B
11	4	3	4	3	1	13	B
12	4	3	3	3	1	12	B
13	4	1	4	3	1	11	B
14	4	1	4	3	1	11	B
15	4	1	4	3	1	11	B
16	4	3	4	3	1	13	B
17	4	1	4	3	1	11	B
18	4	2	3	3	1	11	B
19	4	2	4	3	1	12	B
20	4	1	4	3	1	11	B
21	4	1	4	3	1	11	B
22	4	1	4	3	1	11	B
23	4	1	4	3	1	11	B
24	4	1	4	3	1	11	B
25	4	3	4	3	1	13	B
26	4	1	4	3	1	11	B
27	4	1	3	3	1	10	TB
28	4	1	3	3	1	10	TB
29	4	1	4	3	1	11	B
30	4	1	4	3	1	11	B
31	4	1	4	3	3	11	B
32	4	2	4	3	1	12	B
33	4	2	4	3	1	12	B
34	4	1	4	3	1	11	B
58	4	1	4	3	1	11	B
59	4	3	4	3	1	13	B
60	4	2	4	4	2	16	SB
61	4	1	4	3	1	11	B
62	4	3	4	4	2	17	SB
63	4	1	4	3	1	11	B
64	4	1	3	3	1	10	TB
65	4	2	3	3	1	11	B
66	4	1	4	3	1	11	B
67	4	3	3	3	1	12	B
68	4	1	4	3	1	11	B
69	4	3	3	3	1	12	B
70	4	1	3	3	1	10	TB
71	4	3	3	3	1	12	B
72	4	1	4	3	1	11	B
73	4	3	4	3	1	13	B
74	4	4	4	4	2	18	SB
75	4	3	3	4	2	16	SB
76	4	3	4	4	2	17	SB
77	4	3	4	4	2	17	SB
78	4	3	4	4	2	17	SB
79	4	1	3	3	1	10	TB
80	4	1	3	3	1	10	TB
81	4	2	4	3	1	12	B
82	4	3	3	1	2	13	B
83	4	3	3	3	1	12	B
84	4	1	4	3	1	11	B

35	4	1	3	3	1	10	TB	85	4	1	4	4	2	15	B
36	4	1	3	3	1	10	TB	86	4	3	4	3	1	13	B
37	4	3	4	3	1	13	B	87	4	1	3	3	1	10	TB
38	4	1	3	3	1	10	TB	88	4	3	3	3	1	12	B
39	4	1	4	4	3	14	B	89	4	1	3	3	1	10	TB
40	4	3	4	3	1	13	B	90	4	2	4	3	1	12	B
41	4	1	4	4	2	15	B	91	4	2	3	3	1	11	B
42	4	3	4	4	2	17	SB	92	4	2	3	3	1	11	B
43	4	1	4	4	2	15	B	93	4	1	3	3	1	10	TB
44	4	3	4	3	1	13	B	94	4	1	4	3	1	11	B
45	4	2	4	3	1	12	B	95	4	1	3	3	1	10	TB
46	4	2	3	3	1	11	B	96	4	1	3	3	1	10	TB
47	4	3	3	3	1	12	B	97	4	3	4	3	1	13	B
48	4	3	4	3	1	13	B	98	4	2	3	3	1	11	B
49	4	3	4	3	1	13	B	99	4	1	3	3	1	10	TB
50	4	1	4	3	1	11	B	100	4	3	4	3	1	13	B

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden yang memiliki pengetahuan tentang masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik tentang Madura sebagai provinsi. sangat baik berjumlah 8 responden, baik berjumlah 75 responden, tidak baik berjumlah 17 responden dan sangat tidak baik berjumlah 0 responden.

2. Data Tentang Pemahaman Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Wacana Pemekaran Madura Sebagai Provinsi.

- 1) Persepsi/pendapat masyarakat Bangkalan tentang Keinginan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi dapat Mempercepat Pelayanan Masyarakat di Madura.

Tabel 4.13

NO.	Persepsi	RESPONDEN	PROSENTASE
1.	Sangat Setuju	18	18%
2.	Setuju	69	69%
3.	Kurang Setuju	10	10%
4.	Tidak Setuju	3	3%
JUMLAH		100	100%

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 18(18%) responden, yang menjawab setuju sebanyak 69(69%) responden, yang menjawab kurang setuju sebanyak 10(10%) responden, dan yang menjawab tidak setuju 3 (3%) responden.

Sementara pendapat masyarakat tentang percepatan pelayanan berdasar karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 4.14

		Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju	
		Jmlh	Persen	Jmlh	Persen	Jmlh	Persen	Jmlh	Persen
Jenis Kelamin	Laki-laki	12	12%	43	43%	10	10%	3	3%
	Perempuan	5	5%	24	24%	3	3%	0	0%
Usia	18-30	11	11%	41	41%	9	9%	2	2%
	31-60	6	6%	26	26%	4	4%	1	1%
	>60	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pendidikan	SD	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	SMP	1	1%	3	3%	1	1%	0	0%
	SMA	11	11%	50	50%	9	9%	1	1%
	S1	5	5%	14	14%	3	3%	2	2%
Pekerjaan	Petani	1	1%	8	8%	1	1%	0	0%
	Wiraswasta	1	1%	6	6%	2	2%	0	0%
	Pedagang	2	2%	8	8%	1	1%	1	1%
	PNS	1	1%	4	4%	1	1%	1	1%
	Lain-lain	12	12%	41	41%	8	8%	1	1%

Dari tabel di atas, banyak masyarakat yang berpendapat setuju bahkan sangat setuju dengan tujuan pemekaran Madura sebagai provinsi. Hal ini dapat dilihat dari dominasi masyarakat yang menjawab setuju dan sangat setuju. 43(43%) responden laki-laki dan 24(24%) responden. Dari usia 18-30 41 (41%) responden 31-60 26(26%) responden. Dari pendidikan SMP 3(3%) responden, SMA 50(50%) responden, SI 14 (14%) responden, dari pekerjaan petani 8 (8%) responden, wiraswasta 6 (6%) responden, pedagang 8 (8%) responden, PNS 4 (4%) responden, lain-lain 41 (41%) responden.

- 2) Persepsi/pendapat masyarakat Bangkalan tentang Keinginan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 4.15

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	RESPONDEN	PROSENTASE
1.	Sangat Setuju	23	23%
2.	Setuju	63	63%
3.	Kurang Setuju	10	10%
4.	Tidak Setuju	4	4%
JUMLAH		100	100%

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari 100responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 23(23%) responden, yang menjawab setuju sebanyak 63(63%) responden, yang menjawab kurang setuju

sebanyak 10(10%) responden, dan yang menjawab tidak setuju 4(%) responden.

Sedangkan pendapat masyarakat Bangkalan tentang keinginan elit politik terhadap pemekaran madura sebagai provinsi untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat berdasar karakteristiknya sebagai berikut:

Tabel 4.16

		Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju	
		Jmlh	Persen	Jmlh	Persen	Jmlh	Persen	Jmlh	Persen
Jenis Kelamin	Laki-laki	16	16%	37	37%	10	10%	3	3%
	Perempuan	6	6%	24	24%	1	1%	1	1%
Usia	18-30	13	13%	40	40%	7	7%	3	3%
	31-60	9	9%	23	23%	4	4%	1	1%
	>60	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pendidikan	SD	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	SMP	0	0%	4	4%	1	1%	0	0%
	SMA	15	15%	47	47%	8	8%	1	1%
	S1	7	7%	12	12%	2	2%	3	3%
Pekerjaan	Petani	0	0%	9	9%	1	1%	0	0%
	Wiraswasta	2	2%	5	5%	2	2%	0	0%
	Pedagang	5	5%	5	5%	0	0%	2	2%
	PNS	2	2%	3	3%	1	1%	1	1%
	Lain-lain	13	13%	41	41%	7	7%	1	1%

Sementara pendapat masyarakat Bangkalan untuk mewujudkan kesejahteraannya, didominasi oleh masyarakat yang menjawab setuju dengan adanya pemekaran. Secara rinci berdasar jenis kelaminnya, 37 (37%) responden laki-laki dan 24 (24%) responden perempuan, 40 (40%) responden usia 18-30 tahun dan 23 (23%) responden berusia 31-60 tahun. Dari pendidikannya, 4 (4%) SMP, 47 (47%) SMA, dan 12 (12%) S1. Sementara dari pekerjaannya, petani 9(9%), 5 (5%) wiraswasta, 5 (5%) pedagang, 3 (3%) PNS, dan 41 (41%) responden yang memilih pekerjaan

lain-lain setuju dengan pemekaran Madura untuk mewujudkan kesejahteraannya.

- 3) Persepsi/pendapat masyarakat Bangkalan tentang Keinginan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi dapat Mengembangkan Potensi Di Madura.

Tabel 4.17

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	RESPONDEN	PROSENTASE
1.	Sangat Setuju	24	24%
2.	Setuju	61	61%
3.	Kurang Setuju	8	8%
4.	Tidak Setuju	7	7%
JUMLAH		100	100%

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 24(24%) responden, yang menjawab setuju sebanyak 61(61%) responden, yang menjawab kurang setuju sebanyak 8(8%) responden, dan yang menjawab tidak setuju 7(7%) responden.

Sementara pendapat masyarakat Bangkalan tentang pengembangan potensi sumber daya berdasar karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 4.18

		Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju	
		Jmlh	Persen	Jmlh	Persen	Jmlh	Persen	Jmlh	Persen
Jenis Kelamin	Laki-laki	17	17%	38	38%	8	8%	5	5%
	Perempuan	7	7%	23	23%	0	0%	2	2%
Usia	18-30	17	17%	36	36%	5	5%	5	5%
	31-60	7	7%	25	25%	3	3%	2	2%
	>60	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pendidikan	SD	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	SMP	1	1%	3	3%	1	1%	0	0%
	SMA	16	16%	46	46%	4	4%	5	5%

	S1	7	7%	12	12%	3	3%	2	2%
Pekerjaan	Petani	1	1%	8	8%	1	1%	0	0%
	Wiraswasta	2	2%	5	5%	1	1%	1	1%
	Pedagang	3	3%	7	7%	1	1%	1	1%
	PNS	1	1%	4	4%	1	1%	1	1%
	Lain-lain	17	17%	37	37%	4	4%	4	4%

Begitu pula dengan jawaban masyarakat Bangkalan terkait dengan pengembangan potensi. Banyak masyarakat Bangkalan yang setuju dengan pemekaran. Adapun rinciannya sebagai berikut: 38(38%) responden laki-laki dan 23(23%) responden perempuan, 36(36%) usia 18-30 tahun dan 25(25%) usia 31-60 tahun. Sementara untuk pendidikan didominasi oleh jawaban responden yang berlatar belakang SMA yaitu sebanyak 46(46%) responden dan berdasar pekerjaannya, didominasi oleh responden dengan pekerjaan lain-lain sebanyak 37(37%) responden menjawab setuju tentang pemekaran Madura untuk mengembangkan potensi di pulau Madura.

Dari hasil angket di atas dapat diketahui total skor indikator pemahaman dari masing-masing responden dan selanjutnya dikategorikan sebagai berikut:

Skor Rentang 10 – 12 di katagorikan Sangat Baik (SB)

Skor Rentang 7 – 9 di katagorikan Baik (B)

Skor Rentang 4 – 6 di katagorikan Tidak Baik (TB)

Skor Rentang 1 – 3 di katagorikan Sangat Tidak Baik (STB)

Tabel 4.19

Hasil Angket Indikator Pemahaman Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi

Pemahaman Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi																
	Pemahaman					Pemahaman										
	NO	6	7			8	Total	Ket			NO	6	7	8	Total	Ket
	1	4	4			4	12	SB			51	3	3	3	9	B
	2	3	3			3	9	B			52	3	3	3	9	B
	3	3	3			3	9	B			53	3	3	3	9	B
	4	3	3			3	9	B			54	2	2	1	5	TB
	5	3	3			3	9	B			55	4	4	4	12	SB
	6	2	2			2	6	TB			56	3	3	3	9	B
	7	3	3			3	9	B			57	3	3	3	9	B
	8	3	3			3	9	B			58	4	4	4	12	SB
	9	4	4			4	12	SB			59	3	3	4	10	SB
	10	3	3			3	9	B			60	3	4	4	11	SB
	11	2	2			2	6	TB			61	4	4	4	12	SB
	12	2	2			2	6	TB			62	3	4	4	11	SB
	13	3	3			3	9	B			63	3	3	3	9	B
	14	3	4			3	10	SB			64	2	2	2	6	TB
	15	3	3			3	9	B			65	3	3	3	9	B
	16	3	3			3	9	B			66	3	3	4	10	SB
	17	4	4			3	11	SB			67	4	4	4	12	SB
	18	3	3			3	9	B			68	3	3	4	10	SB
	19	3	3			3	9	B			69	4	3	4	11	SB
	20	3	3			4	10	SB			70	2	1	1	4	TB
	21	1	2			1	4	TB			71	3	3	3	9	B
	22	3	3			4	10	SB			72	3	3	4	10	SB
23	3	3	3	9	B	73	4	4	4	12	SB					
24	3	3	4	10	SB	74	4	4	4	12	SB					

25	1	1	1	3	STB	75	3	3	3	9	B
26	3	4	3	10	SB	76	3	3	3	9	B
27	2	3	3	8	B	77	3	3	3	9	B
28	3	3	3	9	B	78	3	3	3	9	B
29	3	3	3	9	B	79	3	3	3	9	B
30	3	3	3	9	B	80	3	3	4	10	SB
31	3	3	3	9	B	81	3	4	3	10	SB
32	3	3	3	9	B	82	2	2	2	6	TB
33	3	3	3	9	B	83	3	4	3	10	SB
34	3	3	3	9	B	84	2	2	1	5	TB
35	2	1	1	4	TB	85	3	3	3	9	B
36	1	1	2	4	TB	86	3	3	3	9	B
37	3	4	3	10	SB	87	3	3	3	9	B
38	3	4	3	10	SB	88	3	3	3	9	B
39	3	3	3	9	B	89	4	3	4	11	SB
40	2	2	1	5	TB	90	4	3	3	10	SB
41	3	3	3	9	B	91	3	3	3	9	B
42	3	3	3	9	B	92	3	3	3	9	B
43	3	3	3	9	B	93	4	4	4	12	SB
44	4	4	4	12	SB	94	3	3	3	9	B
45	3	3	3	9	B	95	3	3	3	9	B
46	4	4	3	11	SB	96	4	4	4	12	SB
47	4	4	4	12	SB	97	3	3	3	9	B
48	2	2	2	6	TB	98	3	3	3	9	B
49	2	2	2	6	TB	99	3	3	3	9	B
50	3	3	3	9	B	100	3	3	3	9	B

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden yang memiliki pemahaman tentang masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik tentang madura sebagai provinsi. sangat baik berjumlah 33 responden, baik berjumlah 52 responden, tidak baik berjumlah 14 responden dan yang sangat tidak baik berjumlah 1 responden.

3. Data Tentang Penilaian Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Wacana Pemekaran Madura Sebagai Provinsi.

- 1) Persepsi masyarakat Bangkalan tentang Keinginan Pemekaran Madura sebagai provinsi lekat dengan kepentingan segelintir orang atau kepentingan elit politik.

Tabel 4.20

NO.	PERSEPSI MASYARAKAT	RESPONDEN	PROSENTASE
1.	Sangat Setuju	11	11%
2.	Setuju	22	22%
3.	Kurang Setuju	43	43%
4.	Tidak Setuju	24	24%
	JUMLAH	100	100%

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden yang menjawab sangat Setuju sebanyak 11(11%) responden, yang menjawab Setuju 22(22%) responden, yang menjawab Kurang setuju sebanyak 43(43%) responden, dan yang menjawab tidak setuju 24(24%) responden.

Sementara persepsi masyarakat Bangkalan berdasar karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 4.21

		Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju	
		Jmlh	Persen	Jmlh	Persen	Jmlh	Persen	Jmlh	Persen
Jenis Kelamin	Laki-laki	8	8%	12	12%	24	24%	24	24%
	Perempuan	2	2%	4	4%	19	19%	7	7%
Usia	18-30	7	7%	8	8%	27	27%	21	21%
	31-60	3	3%	8	8%	16	16%	10	10%
	>60	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pendidikan	SD	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	SMP	0	0%	0	0%	4	4%	1	1%
	SMA	7	7%	8	8%	33	33%	23	23%
	S1	3	3%	8	8%	6	6%	7	7%
Pekerjaan	Petani	0	0%	0	0%	7	7%	3	3%
	Wiraswasta	1	1%	3	3%	4	4%	1	1%
	Pedagang	3	3%	4	4%	4	4%	1	1%
	PNS	1	1%	1	1%	1	1%	4	4%
	Lain-lain	5	5%	8	8%	27	27%	22	22%

Pendapat masyarakat terkait kepentingan segelintir orang atau kepentingan elit politik dinominasi oleh masyarakat yang kurang setuju bahwa pemekaran Madura sebagai provinsi erat dengan kepentingan elit politik. Adapun rincian pendapat masyarakat tersebut yaitu sebagai berikut: 24 (24%) responden laki-laki dan 16 (16%) responden perempuan, 27 (27%) responden usia 18-30 tahun dan 21 (21%) responden usia 31-60 tahun. Sementara untuk pendidikan didominasi oleh jawaban responden yang berlatar belakang SMA yaitu sebanyak 33 (33%) responden dan berdasar pekerjaannya didominasi oleh responden dengan pekerjaan lain-lain sebanyak 27 (27%) responden.

- 2) Persepsi masyarakat Bangkalan tentang Keinginan Pemekaran Madura sebagai provinsi.

Tabel 4.22

NO.	PERSEPSI MASYARAKAT	RESPONDEN	PROSENTASE
1.	Sangat Setuju	51	51%
2.	Setuju	33	33%
3.	Kurang Setuju	10	10%
4.	Tidak Setuju	6	6%
JUMLAH		100	100%

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden yang menjawab Sangat setuju 51(51%) responden, Menjawab Setuju 33(33%) Responden, 10(10%) responden menjawab Kurang setuju dan 6(6%) responden menjawab tidak setuju terhadap pemekaran Madura sebagai provinsi baru.

Sedangkan persepsi masyarakat Bangkalan berdasar karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 4.23

		Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju	
		Jmlh	Persen	Jmlh	Persen	Jmlh	Persen	Jmlh	Persen
Jenis Kelamin	Laki-laki	35	35%	20	20%	10	10%	3	3%
	Perempuan	14	14%	15	15%	0	0%	3	3%
Usia	18-30	31	31%	21	21%	8	8%	3	3%
	31-60	18	18%	14	14%	2	2%	3	3%
	>60	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pendidikan	SD	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	SMP	3	3%	1	1%	1	1%	0	0%
	SMA	37	37%	24	24%	7	7%	3	3%
	S1	9	9%	10	10%	2	2%	3	3%
Pekerjaan	Petani	4	4%	5	5%	1	1%	0	0%
	Wiraswasta	3	3%	3	3%	1	1%	2	2%
	Pedagang	6	6%	4	4%	1	1%	1	1%
	PNS	2	2%	3	3%	0	0%	2	2%
	Lain-lain	34	34%	20	20%	7	7%	1	1%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Bangkalan sangat setuju tentang pemekaran madura sebagai provinsi dengan rincian sebagai berikut: 35 (35%) responden laki-laki dan 14 (14%) responden perempuan, 31 (31%) responden usia 18-30 tahun dan 18 (18%) responden usia 31-60 tahun. Sementara untuk pendidikan didominasi oleh jawaban responden yang berlatar belakang SMA yaitu sebanyak 37 (37%) responden dan berdasar pekerjaannya didominasi oleh responden dengan pekerjaan lain-lain sebanyak 34 (34%) responden.

Dari hasil angket di atas dapat diketahui total skor indikator penilaian masing-masing responden dikategorikan sebagai berikut:

Skor Rentang 7 – 8 di katagorikan Sangat Baik (SB)

Skor Rentang 5 – 6 di katagorikan Baik (B)

Skor Rentang 3 – 4 di katagorikan Tidak Baik (TB)

Skor Rentang 1 – 2 di katagorikan Sangat Tidak Baik (STB)

Tabel 4.24

Hasil Angket Indikator Penilaian Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi

Penilaian Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi										
NO	Penilaian					NO	Penilaian			
	9	10	Total	Ket			9	10	Total	Ket
1	3	4	7	SB		51	2	4	6	B
2	1	4	5	B		52	2	4	6	B

3	2	3	5	B	53	1	4	5	B
4	2	3	5	B	54	3	1	4	TB
5	2	4	6	B	55	1	4	5	B
6	3	2	5	B	56	2	3	5	B
7	2	3	5	B	57	2	3	5	B
8	3	4	7	SB	58	1	4	5	B
9	2	4	6	B	59	1	4	5	B
10	1	4	5	B	60	1	4	5	B
11	3	1	4	TB	61	4	4	8	SB
12	3	2	5	B	62	3	4	7	SB
13	2	4	6	B	63	2	3	5	B
14	2	3	5	B	64	1	2	3	TB
15	2	4	6	B	65	1	3	4	TB
16	1	4	5	B	66	1	4	5	B
17	2	4	6	B	67	2	4	6	B
18	2	3	5	B	68	2	3	5	B
19	2	4	6	B	69	4	4	8	SB
20	2	3	5	B	70	4	2	6	B
21	4	2	6	B	71	1	1	2	STB
22	2	4	6	B	72	2	3	5	B
23	1	4	5	B	73	1	4	5	B
24	1	3	4	TB	74	1	4	5	B
25	4	1	5	B	75	3	3	6	B
26	1	4	5	B	76	3	3	6	B
27	2	3	5	B	77	2	4	6	B
28	1	3	4	TB	78	2	3	5	B
29	1	3	4	TB	79	3	4	7	SB

30	2	3	5	B	80	2	3	5	B
31	2	3	5	B	81	1	3	4	TB
32	2	3	5	B	82	2	2	4	TB
33	2	3	5	B	83	4	4	8	SB
34	1	3	4	TB	84	2	1	3	TB
35	3	1	4	TB	85	4	3	7	SB
36	3	2	5	B	86	3	3	6	B
37	4	4	8	SB	87	1	3	4	TB
38	3	3	6	B	88	2	3	5	B
39	3	4	7	B	89	2	4	6	B
40	2	2	4	TB	90	2	4	6	B
41	3	3	6	B	91	1	4	5	B
42	2	3	5	B	92	1	3	4	TB
43	2	4	6	B	93	1	4	5	B
44	1	4	5	B	94	2	4	6	B
45	2	4	6	B	95	2	4	6	B
46	2	4	6	B	96	1	4	5	B
47	1	4	5	B	97	1	3	4	TB
48	4	2	6	B	98	1	4	5	B
49	4	2	6	B	99	2	4	6	B
50	2	4	6	B	100	1	4	5	B

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden yang memiliki Penilaian tentang masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik tentang madura sebagai provinsi. sangat baik berjumlah 9 responden, baik berjumlah 74 responden, tidak baik berjumlah 16 responden, dan yang sangat tidak baik berjumlah 1 responden.

4. Data Tentang Persepsi masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi.

Adapun hasil angket dari semua indikator pengetahuan, pemahaman dan penilaian masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik tentang pemekaran Madura sebagai provinsi akan dimasukkan kedalam tabulasi data dan akan didapatkan jumlah skor total dari masing-masing responden. Skor total diklasifikasi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Skor Rentang 31-40 di katagorikan Sangat Baik (SB)

Skor Rentang 21-30 di katagorikan Baik (B)

Skor Rentang 11-20 di katagorikan Tidak Baik (TB)

Skor Rentang 0-10 di katagorikan Sangat Tidak Baik (STB)

Tabel 4.25

Hasil Angket Persepsi Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi

NO	Persepsi Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi										Total	Ket
	Pengetahuan					Pemahaman			Penilaian			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	4	1	4	3	1	4	4	4	3	4	32	SB
2	4	1	4	3	1	3	3	3	1	4	27	B
3	4	1	4	3	1	3	3	3	2	3	27	B
4	4	1	4	3	1	3	3	3	2	3	27	B

5	4	1	4	3	1	3	3	3	2	4	28	B
6	4	1	4	3	1	2	2	2	3	2	24	B
7	4	1	3	3	1	3	3	3	2	3	26	B
8	4	2	3	3	1	3	3	3	3	4	29	B
9	4	1	4	3	1	4	4	4	2	4	31	SB
10	4	1	4	3	1	3	3	3	1	4	27	B
11	4	3	4	3	1	2	2	2	3	1	25	B
12	4	3	3	3	1	2	2	2	3	2	25	B
13	4	1	4	3	1	3	3	3	2	4	28	B
14	4	1	4	3	1	3	4	3	2	3	28	B
15	4	1	4	3	1	3	3	3	2	4	28	B
16	4	3	4	3	1	3	3	3	1	4	29	B
17	4	1	4	3	1	4	4	3	2	4	30	B
18	4	2	3	3	1	3	3	3	2	3	27	B
19	4	2	4	3	1	3	3	3	2	4	29	B
20	4	1	4	3	1	3	3	4	2	3	28	B
21	4	1	4	3	1	1	2	1	4	2	23	B
22	4	1	4	3	1	3	3	4	2	4	29	B
23	4	1	4	3	1	3	3	3	1	4	27	B
24	4	1	4	3	1	3	3	4	1	3	27	B
25	4	3	4	3	1	1	1	1	4	1	23	B
26	4	1	4	3	1	3	4	3	1	4	28	B
27	4	1	3	3	1	2	3	3	2	3	25	B
28	4	1	3	3	1	3	3	3	1	3	25	B
29	4	1	4	3	1	3	3	3	1	3	26	B
30	4	1	4	3	1	3	3	3	2	3	27	B
31	4	1	4	3	3	3	3	3	2	3	29	B

32	4	2	4	3	1	3	3	3	2	3	28	B
33	4	2	4	3	1	3	3	3	2	3	28	B
34	4	1	4	3	1	3	3	3	1	3	26	B
35	4	1	3	3	1	2	1	1	3	1	20	TB
36	4	1	3	3	1	1	1	2	3	2	21	B
37	4	3	4	3	1	3	4	3	4	4	33	SB
38	4	1	3	3	1	3	4	3	3	3	28	B
39	4	1	4	4	3	3	3	3	3	4	32	SB
40	4	3	4	3	1	2	2	1	2	2	24	B
41	4	1	4	4	2	3	3	3	3	3	30	B
42	4	3	4	4	2	3	3	3	2	3	31	SB
43	4	1	4	4	2	3	3	3	2	4	30	B
44	4	3	4	3	1	4	4	4	1	4	32	SB
45	4	2	4	3	1	3	3	3	2	4	29	B
56	4	2	3	3	1	4	4	3	2	4	30	B
47	4	3	3	3	1	4	4	4	1	4	31	SB
48	4	3	4	3	1	2	2	2	4	2	27	B
49	4	3	4	3	1	2	2	2	4	2	27	B
50	4	1	4	3	1	3	3	3	2	4	28	B
51	4	1	3	3	1	3	3	3	2	4	27	B
52	4	1	4	3	1	3	3	3	2	4	28	B
53	4	1	4	3	1	3	3	3	1	4	27	B
54	4	1	4	3	1	2	2	1	3	1	22	B
55	4	3	4	3	1	4	4	4	1	4	32	SB
56	4	3	4	3	1	3	3	3	2	3	29	B
57	4	1	4	3	1	3	3	3	2	3	27	B
58	4	1	4	3	1	4	4	4	1	4	30	B

59	4	3	4	3	1	3	3	4	1	4	30	B
60	4	2	4	4	2	3	4	4	1	4	32	B
61	4	1	4	3	1	4	4	4	4	4	33	B
62	4	3	4	4	2	3	4	4	3	4	35	B
63	4	1	4	3	1	3	3	3	2	3	27	B
64	4	1	3	3	1	2	2	2	1	2	21	B
65	4	2	3	3	1	3	3	3	1	3	26	B
66	4	1	4	3	1	3	3	4	1	4	28	B
67	4	3	3	3	1	4	4	4	2	4	32	SB
68	4	1	4	3	1	3	3	4	2	3	28	B
69	4	3	3	3	1	4	3	4	4	4	33	SB
70	4	1	3	3	1	2	1	1	4	2	22	B
71	4	3	3	3	1	3	3	3	1	1	25	B
72	4	1	4	3	1	3	3	4	2	3	28	B
73	4	3	4	3	1	4	4	4	1	4	32	SB
74	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	35	SB
75	4	3	3	4	2	3	3	3	3	3	31	SB
76	4	3	4	4	2	3	3	3	3	3	32	SB
77	4	3	4	4	2	3	3	3	2	4	32	SB
78	4	3	4	4	2	3	3	3	2	3	31	SB
79	4	1	3	3	1	3	3	3	3	4	28	B
80	4	1	3	3	1	3	3	4	2	3	27	B
81	4	2	4	3	1	3	4	3	1	3	28	B
82	4	3	3	1	2	2	2	2	2	2	23	B
83	4	3	3	3	1	3	4	3	4	4	32	SB
84	4	1	4	3	1	2	2	1	2	1	21	B
85	4	1	4	4	2	3	3	3	4	3	31	SB

86	4	3	4	3	1	3	3	3	3	3	30	B
87	4	1	3	3	1	3	3	3	1	3	25	B
88	4	3	3	3	1	3	3	3	2	3	28	B
89	4	1	3	3	1	4	3	4	2	4	29	B
90	4	2	4	3	1	4	3	3	2	4	30	B
91	4	2	3	3	1	3	3	3	1	4	27	B
92	4	2	3	3	1	3	3	3	1	3	26	B
93	4	1	3	3	1	4	4	4	1	4	29	B
94	4	1	4	3	1	3	3	3	2	4	28	B
95	4	1	3	3	1	3	3	3	2	4	27	B
96	4	1	3	3	1	4	4	4	1	4	29	B
97	4	3	4	3	1	3	3	3	1	3	28	B
98	4	2	3	3	1	3	3	3	1	4	27	B
99	4	1	3	3	1	3	3	3	2	4	27	B
100	4	3	4	3	1	3	3	3	1	4	29	B

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden yang memiliki pemahaman tentang masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik tentang madura sebagai provinsi. sangat baik berjumlah 18 responden, baik berjumlah 81 responden , tidak baik berjumlah 1 responden dan sangat tidak baik berjumlah 0 responden.

D. Analisis Data

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab III, dalam penelitian ini bahwa untuk menganalisis data tentang persepsi masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi digunakan rumus persentase sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

P = Persepsi Masyarakat

F = Jumlah responden berdasarkan rentang skor tiap indikator

N = Jumlah Sampel

Persepsi masyarakat Bangkalan tentang keinginan elit politik tentang pemekaran Madura sebagai provinsi dianalisis kedalam tiga indikator berikut: 1) Pengetahuan masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi. 2) Pemahaman masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik tentang pemekaran Madura sebagai provinsi. 3) Penilaian masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi. Kemudian akan dilanjutkan dengan menganalisis persepsi masyarakat Bangkalan tentang keinginan elit politik tentang pemekaran Madura sebagai provinsi.

1. Analisis Data tentang Pengetahuan Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi

Dari Penyajian data hasil angket tentang pengetahuan masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran madura sebagai provinsi di atas dapat diketahui jumlah skor masing-masing responden dari indikator pengetahuan yang dikategorikan sangat baik berjumlah 8 responden, baik berjumlah 75 responden, tidak baik berjumlah 17

responden. Selanjutnya masing-masing katagori dimasukkan dalam rumus persentase sebagai berikut.

1. Katagori sangat baik

$$P = \frac{8}{100} \times 100\% = 8\%$$

2. Katagori baik

$$P = \frac{75}{100} \times 100\% = 75\%$$

3. Katagori tidak baik

$$P = \frac{17}{100} \times 100\% = 17\% \text{ Tidak Baik}$$

4. Katagori sangat tidak baik

$$P = \frac{0}{100} \times 100\% = 0\% \text{ Sangat Tidak Baik}$$

Dari indikator pengetahuan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Bangkalan yang memiliki pengetahuan sangat baik terhadap kebijakan elit politik tentang pemekaran Madura sebagai provinsi berjumlah 8 orang atau setara 8%, memiliki pengetahuan Baik 75 orang atau setara 75%, memiliki pengetahuan Tidak Baik 17 orang atau setara 17%, dan memiliki pengetahuan yang Sangat Tidak Baik 0 orang atau setara 0%.

2. Analisis Data tentang Pemahaman Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi

Berdasarkan data indikator pemahaman diatas dapat diketahui masyarakat Bangkalan yang memiliki pemahaman sangat baik terhadap kebijakan elit politik tentang pemekaran madura sebagai provinsi berjumlah

33 responden, baik berjumlah 52 responden, tidak baik berjumlah 14 responden dan yang sangat tidak baik berjumlah 1 responden.

1. Katagori Sangat Baik

$$P = \frac{33}{100} \times 100\% = 33\%$$

2. Katagori Baik

$$P = \frac{52}{100} \times 100\% = 52\%$$

3. Katagori tidak Baik

$$P = \frac{14}{100} \times 100\% = 14\%$$

4. Katagori Sangat tidak Baik

$$P = \frac{1}{100} \times 100\% = 1\%$$

Dari data indikator pemahaman dapat diketahui bahwa masyarakat Bangkalan yang memiliki pemahaman sangat baik terhadap kebijakan elit politik tentang pemekaran Madura sebagai provinsi berjumlah 33 responden atau setara 33%, yang memiliki pemahaman Baik 52 responden atau setara 52%, yang memiliki pemahaman Tidak Baik 14 responden atau setara dengan 14%, dan yang memiliki pemahaman Sangat Tidak Baik 1 responden atau setara dengan 1 %.

3. Analisis Data tentang penilaian Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden yang memiliki Penilaian tentang masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik tentang

madura sebagai provinsi. sangat baik berjumlah 9 responden, baik berjumlah 74 responden, tidak baik berjumlah 16 responden, dan yang sangat tidak baik berjumlah 1 responden.

1. Katagori Sangat Baik

$$P = \frac{9}{100} \times 100\% = 9\%$$

2. Katagori Baik

$$P = \frac{74}{100} \times 100\% = 74\%$$

3. Katagori tidak Baik

$$P = \frac{16}{100} \times 100\% = 16\%$$

4. Katagori Sangat tidak Baik

$$P = \frac{1}{100} \times 100\% = 1\%$$

Dari data indikator penilaian di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Bangkalan yang memiliki penilaian sangat baik terhadap keinginan elit politik tentang pemekaran Madura sebagai provinsi berjumlah 9 responden atau setara dengan 9%, penilaian Baik 74 responden atau setara dengan 74%, penilaian Tidak Baik 16 responden atau setara dengan 16%, dan penilaian yang Sangat Tidak Baik 1 responden atau setara dengan 1%.

4. Analisis Data tentang Persepsi Masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden yang memiliki pemahaman tentang masyarakat Bangkalan terhadap kebijakan elit politik dalam

mewujudkan Madura sebagai provinsi. sangat baik berjumlah 18 responden, baik berjumlah 81 responden, tidak baik berjumlah 1 responden dan sangat tidak baik berjumlah 0 responden.

1. Katagori Sangat Baik

$$P = \frac{18}{100} \times 100\% = 18\%$$

2. Katagori Baik

$$P = \frac{81}{100} \times 100\% = 81\%$$

3. Katagori tidak Baik

$$P = \frac{1}{100} \times 100\% = 1\%$$

4. Katagori Sangat tidak Baik

$$P = \frac{0}{100} \times 100\% = 0\%$$

Dari data persepsi masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi diatas dapat diketahui masyarakat yang memiliki persepsi sangat baik terhadap kebijakan elit politik tentang pemekaran madura sebagai provinsi berjumlah 18 responden atau setara dengan 18%, Baik 81 responden atau setara dengan 81%, Tidak Baik 1 responden atau setara dengan 1%, dan Sangat Tidak Baik 0 responden atau setara dengan 0%.

BAB V

PERSEPSI MASYARAKAT BANGKALAN TERHADAP KEINGINAN ELIT POLITIK DALAM MEWUJUDKAN PEMEKARAN MADURA SEBAGAI PROVINSI

Pembentukan Madura sebagai provinsi baru merupakan sebuah harapan besar bagi kemajuan masyarakat Madura, dalam hal ini tentunya Madura yang merupakan pulau yang memiliki luas 5.168 km² sangatlah sesuai ketika memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur dan membentuk Provinsi Madura. Pembentukan provinsi ini tidak terlepas dari beberapa kerangka dan dasar hukum seperti Otonomi daerah, desentralisasi, dan terakhir adalah Pemekaran daerah hal inilah yang menjadi kerangka dalam mewujudkan. Pemekaran ini tentunya bukan sebuah kepentingan sesaat akan tetapi pemekaran ini merupakan cita-cita bersama masyarakat Madura mulai dari tingkat elit Madura sampai masyarakat bawah dengan tujuan kesejahteraan bersama.

Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Dalam konteks UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Untuk Pembentukan Daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang

memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.⁸³ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001 telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan Pemerintahan yang sentralistik-birokratis ke arah desentralistik-partisipatoris. UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggung jawab pada daerah kabupaten dan kota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan lebih jauh diharapkan akan

⁸³ Nurcholis Hanif, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2007 hal 30

menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah.⁸⁴

Desentralisasi⁸⁵ Adalah azas penyelenggara pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (*local government*), adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih (pemerintah lokal), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan daerah.

Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Terdapat beberapa alasan mengapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu:⁸⁶

⁸⁴ Syaukani HR, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm.233

⁸⁵ Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

⁸⁶ Ibid hal. 112

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal . Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

Dalam pembentukan Madura Sebagai Provinsi ini ada kendala yang terjadi dilapangan yaitu Syarat administratif yang kurang terpenuhi yaitu Madura memiliki 4 Kabupaten sedangkan merujuk pada Peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan

penggabungan daerah. Pasal 4 ayat 1 menyebutkan 3 syarat pembentukan wilayah administratif pemerintahan, dalam Pembentukan Provinsi Baru harus memiliki paling sedikit 5 kabupaten/kota.

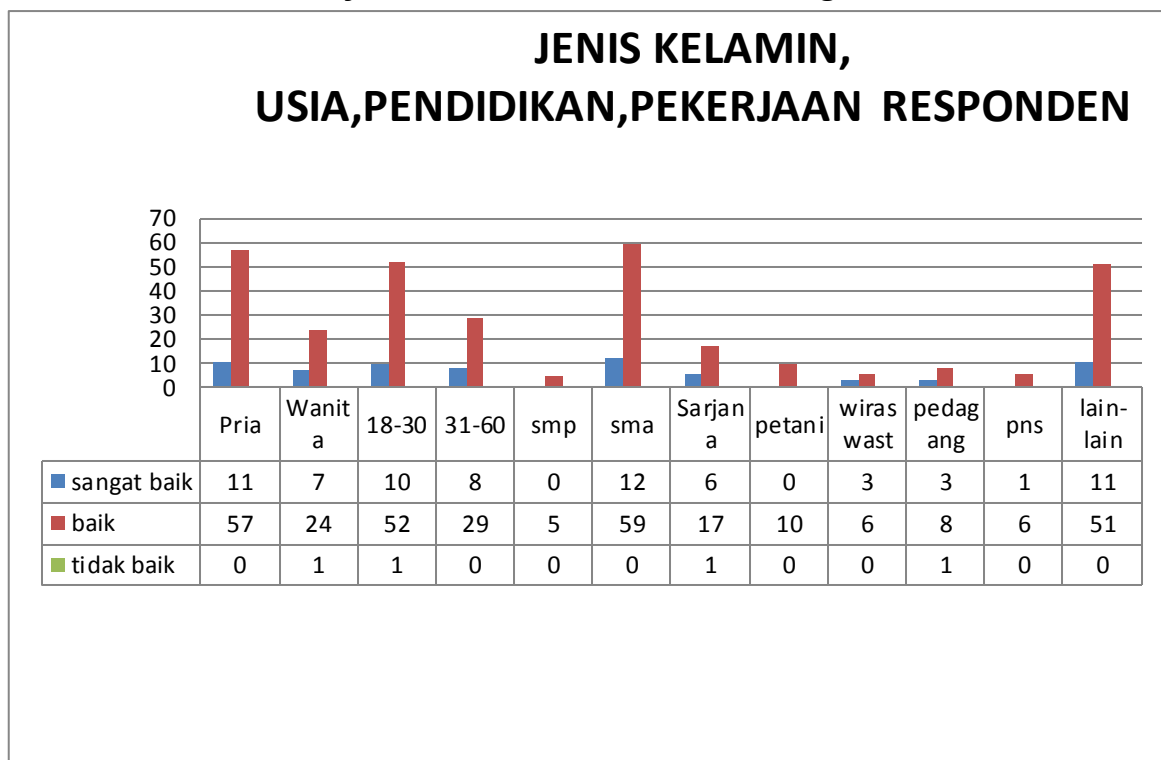
Persepsi Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik dalam mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi dengan Hasil temuan dilapangan terkait Persepsi masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik tentang madura sebagi provinsi dengan penilaian Baik sebanyak 81 orang atau 81% dengan karakteristik laki-laki 57 orang atau 57% perempuan 24 orang atau 24%, dengan karakteristik usia 18-30 sebanyak 52 orang atau 52% untuk umur 31-60 sebanyak 29 orang atau 29%, dengan pendidikan SMP 5 orang atau 5%, SMA 59 orang atau 59% S1 sebanyak 17 orang atau 17%. Karakteristik Pekerjaan Petani 10 orang atau 10% wiraswasta 6 orang atau 6% pedagang 8 orang atau 8% PNS 6 orang atau 6% dan lain-lain 51 orang atau 51%.

Dalam persepsi masyarakat dengan penilaian Sangat Baik 18 orang atau 18% dari total sampel penelitian ini. Dengan karakteristik Laki-laki 11 orang atau 11% perempuan 7 orang atau 7%, dengan usia 18-30 sebanyak 10 orang atau 10% , usia 31-60 sebanyak 8 orang, karakter pendidikan SMA sebanyak 12 orang atau 12%, S1 atau Sebanyak 6 orang atau 6% dengan Pekerjaan Wiraswasta 3 orang atau 3%, Pedagang 3 orang atau 3% PNS 1 Orang atau 1%, Lain-lain sebanyak 11 orang atau 11%.

Masyarakat bangkalan dengan penilaian tidak baik sebanyak 1 orang atau 1% dengan karakteristik perempuan, usia 18-30, Pendidikan S1 dan pekerjaan Pedagan

Gambar 5.1

Persepsi Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi



Berikut jika disajikan lebih rinci berdasarkan indikator tentang Persepsi Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi yang terdiri dari 3 indikator :

- 1) Pengetahuan masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran madura sebagai provinsi.
- 2) Pemahaman masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran madura sebagai provinsi.
- 3) penilaian masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran madura sebagai provinsi. Maka sebagai berikut:

A. Pengetahuan Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi

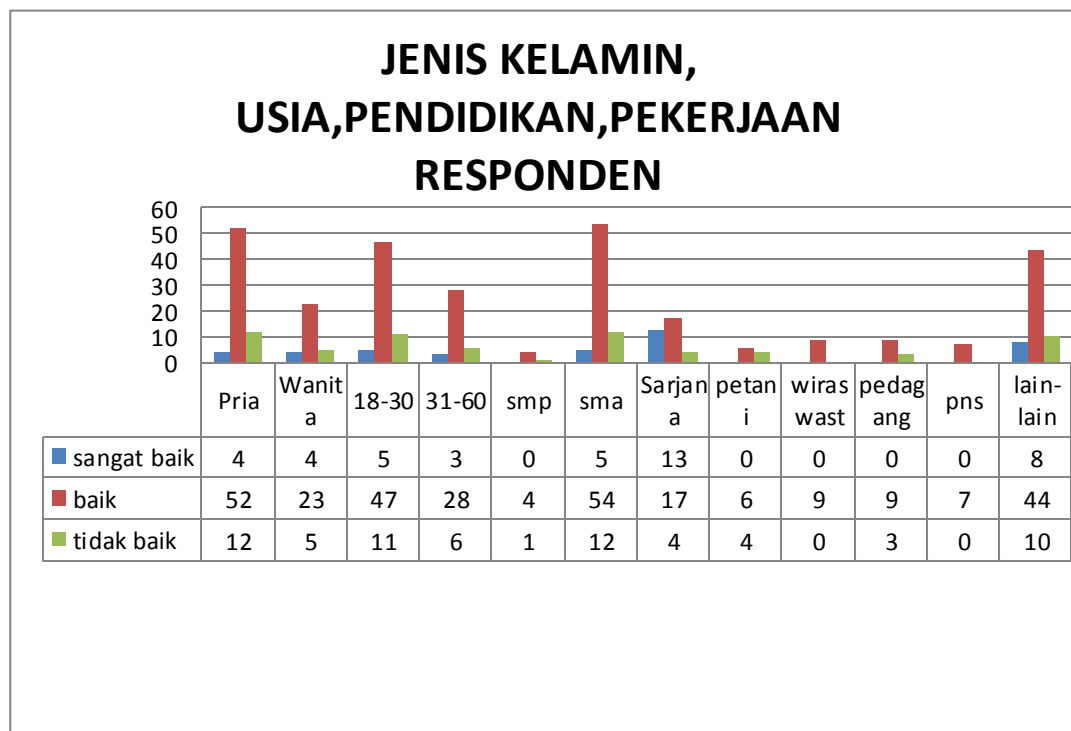
Pengetahuan masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran madura sebagai provinsi dengan penilaian baik sebanyak 75 orang atau 75% dengan karakteristik laki-laki 52 orang atau 52% perempuan 23 atau 23%. Usia 18-30 sebanyak 47 orang atau 47%, 31-60 sebanyak 28 orang atau 28%. Karakteristik pendidikan SMP 4 orang atau 4% SMA 54 orang atau 54% S1 17 orang atau 17%, dengan karakteristik Petani 6 orang atau 6% wiraswasta 9 orang atau 9% pedagang 9 orang atau 9% PNS 7 orang atau 7% dan lain-lain 44 orang atau 44%.

Pengetahuan masyarakat Bangkalan dengan penilain tidak baik sebanyak 17 respomden atau 17% dengan karakteristik laki-laki 12 orang atau 12% perempuan 5 atau 5%. Usia 18-30 sebanyak 11 orang atau 11%, 31-60 sebanyak 6 orang atau 6%. Karakteristik pendidikan SMP 1 orang atau 1% SMA 12 orang atau 12% S1 4 orang atau 4%, dengan karakteristik Petani 4 orang atau 4% pedagang 3 orang atau 3% dan lain-lain 10 orang atau 10%.

Pengetahuan masyarakat Bangkalan dengan penilaian sangat baik berjumlah 8 responden atau 8% dengan karakteristik laki-laki 4 orang atau 4% perempuan 4 atau 4%. Usia 18-30 sebanyak 5 orang atau 5%, 31-60 sebanyak 3 orang atau 3%. Karakteristik pendidikan SMA 5 orang atau 5%, S1 3 orang atau 3%, dengan karakteristik pekerjaan lain-lain 8 orang atau 8%.

Gambar 5.2

Pengetahuan Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi



B. Pemahaman Masyarakat Bangkalan Tentang Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi

Pemahaman masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran madura sebagai provinsi dengan penilaian baik sebanyak 52 orang atau 52% dengan karakteristik laki-laki 35 orang atau 35% perempuan 17 atau 17%. Usia 18-30 sebanyak 33 orang atau 33%, 31-60 sebanyak 19 orang atau 19%. Karakteristik pendidikan SMP 3 orang atau 3%, SMA 35 orang atau 35%, S1 14 orang atau 14%, dengan karakteristik Pekerjaan Petani 9 orang atau

9% wiraswasta 5 orang atau 5% pedagang 4 orang atau 4% PNS 4 orang atau 4% dan lain-lain 30 orang atau 30%.

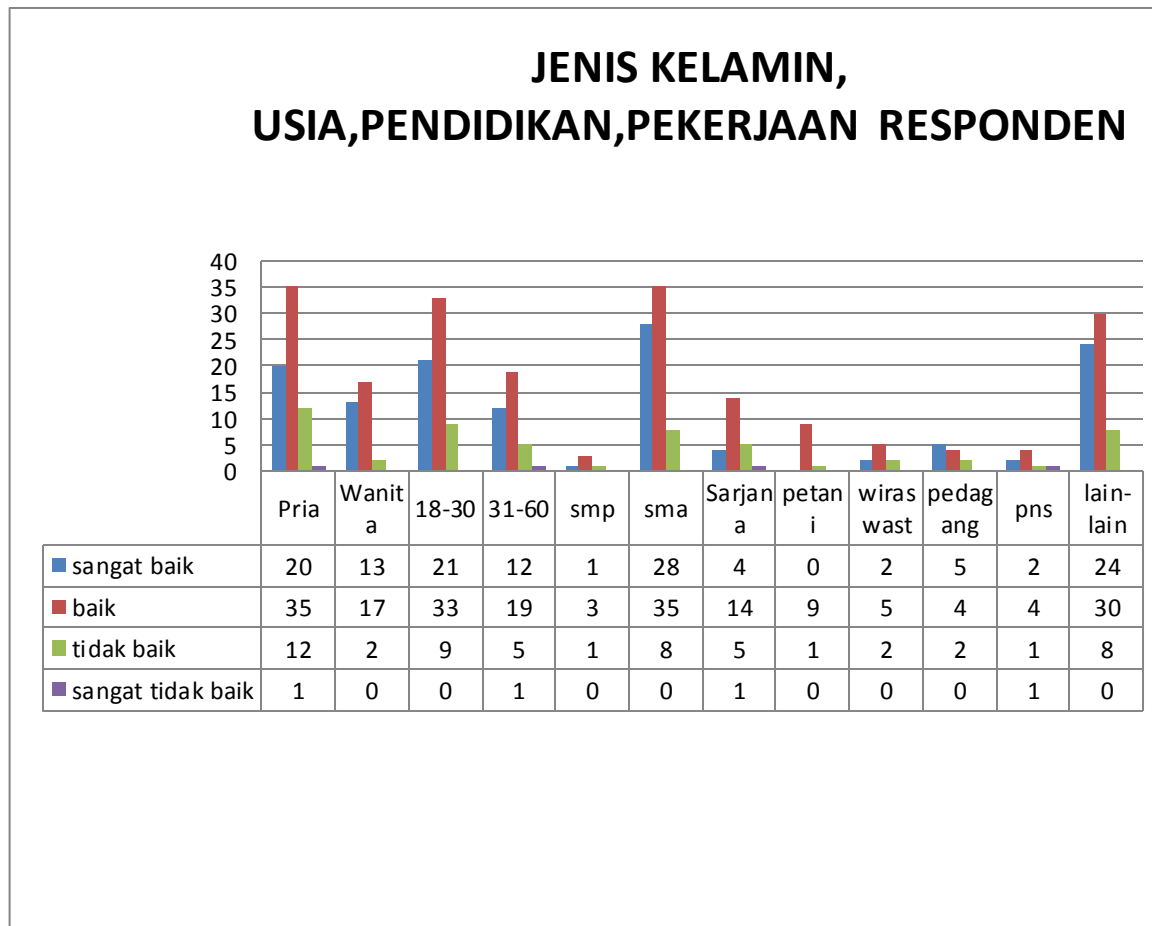
Pemahaman masyarakat Bangkalan dengan penilaian sangat baik sebanyak 33 orang atau 33%, dengan karakteristik laki-laki 20 orang atau 20% perempuan 13 atau 13%. Usia 18-30 sebanyak 21 orang atau 21%, 31-60 sebanyak 12 orang atau 12%. Karakteristik pendidikan SMP sebanyak 1 orang atau 1%, SMA 28 orang atau 28%, S1 4 orang atau 4%, dengan karakteristik pekerjaan wiraswasta 2 orang atau 2%, pedagang 5 orang atau 5%, PNS 2 orang atau 2%, lain-lain 24 orang atau 24%.

Pemahaman masyarakat Bangkalan dengan penilaian Tidak Baik sebanyak 14 orang atau 14%, dengan karakteristik laki-laki 12 orang atau 12% perempuan 2 atau 2%. Usia 18-30 sebanyak 9 orang atau 9%, 31-60 sebanyak 5 orang atau 5%. Karakteristik pendidikan SMP 1 orang atau 1%, SMA 8 orang atau 8%, S1 5 orang atau 5%, dengan karakteristik Pekerjaan Petani 1 orang atau 1% wiraswasta 2 orang atau 2% pedagang 2 orang atau 2% PNS 1 orang atau 1% dan lain-lain 8 orang atau 8%.

Pemahaman masyarakat Bangkalan yang memberikan penilaian Sangat Tidak baik berjumlah 1 orang atau 1% dengan karakteristik Laki-laki usia 31-60, pendidikan S1, pekerjaan PNS.

Gambar 5.3

Pemahaman Masyarakat Bangkalan Tentang Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi



C. Penilaian Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi

Penilaian masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran madura sebagai provinsi dengan penilaian baik sebanyak 74 orang atau 74% dengan karakteristik laki-laki 52 orang atau 52% perempuan 22 atau 22%. Usia 18-30 sebanyak 48 orang atau 48%, 31-60 sebanyak 26 orang atau 26%. Karakteristik pendidikan SMP 4 orang atau 4%, SMA 53 orang atau 53%, S1 17 orang atau 17%, dengan karakteristik Pekerjaan

Petani 7 orang atau 7% wiraswasta 4 orang atau 4% pedagang 7 orang atau 7%, PNS 4 orang atau 4% dan lain-lain 52 orang atau 52%.

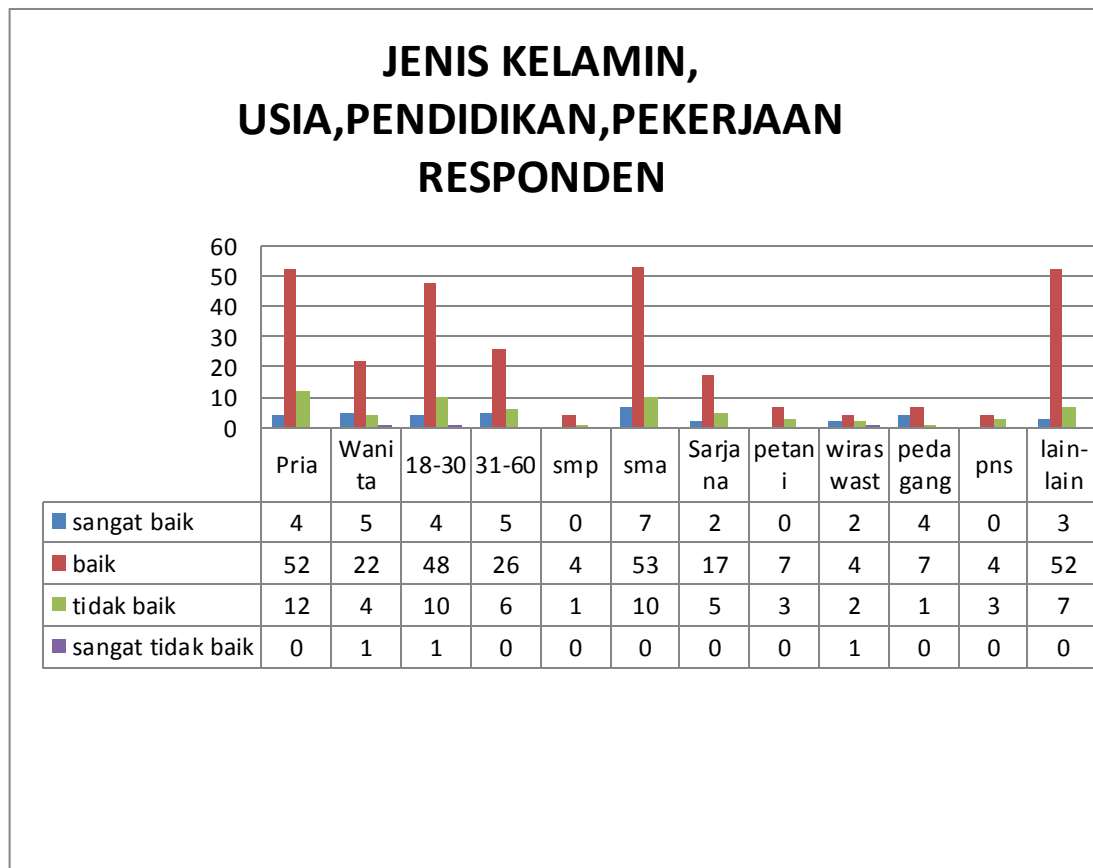
Penilaian masyarakat Bangkalan dengan penilaian Tidak Baik sebanyak 16 orang atau 16%, dengan karakteristik laki-laki 12 orang atau 12% perempuan 4 atau 4%. Usia 18-30 sebanyak 10 orang atau 10%, 31-60 sebanyak 6 orang atau 6%. Karakteristik pendidikan SMP 1 orang atau 1%, SMA 10 orang atau 10%, S1 5 orang atau 5%, dengan karakteristik Pekerjaan Petani 3 orang atau 3% wiraswasta 2 orang atau 2% pedagang 1 orang atau 1% PNS 3 orang atau 3% dan lain-lain 7 orang atau 7%.

penilaian masyarakat Bangkalan dengan penilaian Sangat Baik sebanyak 9 orang atau 9%, dengan karakteristik laki-laki 4 orang atau 4% perempuan 5 atau 5%. Usia 18-30 sebanyak 4 orang atau 9%, 31-60 sebanyak 5 orang atau 5%. Karakteristik pendidikan SMA 7 orang atau 7%, S1 2 orang atau 2%, dengan karakteristik Pekerjaan wiraswasta 2 orang atau 2% pedagang 4 orang atau 4% dan lain-lain 3 orang atau 3%.

penilaian Sangat tidak baik sebanyak 1 orang atau 1% dengan karakteristik perempuan usia 18-30, pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta

Gambar 5.4

**Penilaian Masyarakat Bangkalan Terhadap Keinginan Elit Politik Dalam
Mewujudkan Pemekaran Madura Sebagai Provinsi**



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan persepsi masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran Madura sebagai provinsi dengan penilaian Baik sebanyak 81 orang atau 81% dengan karakteristik laki-laki 57 orang atau 57% perempuan 24 orang atau 24%, dengan karakteristik usia 18-30 sebanyak 52 orang atau 52% untuk umur 31-60 sebanyak 29 orang atau 29%, dengan pendidikan SMP 5 orang atau 5%, SMA 59 orang atau 59% S1 sebanyak 17 orang atau 17%. Karakteristik Pekerjaan Petani 10 orang atau 10% wiraswasta 6 orang atau 6% pedagang 8 orang atau 8% PNS 6 orang atau 6% dan lain-lain 51 orang atau 51%.

Dalam persepsi masyarakat Bangkalan dengan penilaian Sangat Baik 18 orang atau 18% dari total sampel penelitian ini. Dengan karakteristik Laki-laki 11 orang atau 11% perempuan 7 orang atau 7%, dengan usia 18-30 sebanyak 10 orang atau 10% , usia 31-60 sebanyak 8 orang, karakter pendidikan SMA sebanyak 12 orang atau 12%, S1 atau Sebanyak 6 orang atau 6% dengan Pekerjaan Wiraswasta 3 orang atau 3%, Pedagang 3 orang atau 3% PNS 1 Orang atau 1%, Lain-lain sebanyak 11 orang atau 11%.

Masyarakat Bangkalan dengan penilaian tidak baik sebanyak 1 orang atau 1% dengan karakteristik perempuan, usia 18-30, Pendidikan S1 dan pekerjaan Pedagang.

Berikut jika disajikan lebih rinci berdasarkan indikator tentang persepsi masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran madura sebagai provinsi yang terdiri dari 3 indikator :

- 4) Pengetahuan masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran madura sebagai provinsi.
- 5) Pemahaman masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran madura sebagai provinsi.
- 6) Penilaian masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran madura sebagai provinsi. Maka sebagai berikut:

I. Pengetahuan masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran madura Sebagai Provinsi

Pengetahuan masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran madura sebagai provinsi dengan penilaian baik sebanyak 75 orang atau 75% dengan karakteristik laki-laki 52 orang atau 52% perempuan 23 atau 23%. Usia 18-30 sebanyak 47 orang atau 47%, 31-60 sebanyak 28 orang atau 28%. Karakteristik pendidikan SMP 4 orang atau 4% SMA 54 orang atau 54% S1 17 orang atau 17%, dengan karakteristik Petani 6 orang atau 6% wiraswasta 9 orang atau 9% pedagang 9 orang atau 9% PNS 7 orang atau 7% dan lain-lain 44 orang atau 44%.

Pengetahuan masyarakat Bangkalan dengan penilaian tidak baik dengan karakteristik laki-laki 12 orang atau 12% perempuan 5 atau 5%. Usia 18-30 sebanyak 11 orang atau 11%, 31-60 sebanyak 6 orang atau 6%. Karakteristik pendidikan SMP 1 orang atau 1% SMA 12 orang atau 12% S1 4 orang atau 4%,

dengan karakteristik Petani 4 orang atau 4% pedagang 3 orang atau 3% dan lain-lain 10 orang atau 10%.

Pengetahuan masyarakat Bangkalan dengan penilaian sangat baik dengan karakteristik laki-laki 4 orang atau 4% perempuan 4 atau 4%. Usia 18-30 sebanyak 5 orang atau 5%, 31-60 sebanyak 3 orang atau 3%. Karakteristik pendidikan SMA 5 orang atau 5%, S1 3 orang atau 3%, dengan karakteristik pekerjaan lain-lain 8 orang atau 8%.

II. Pemahaman masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran madura Sebagai Provinsi

Pemahaman masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran madura sebagai provinsi dengan penilaian baik sebanyak 52 orang atau 52% dengan karakteristik laki-laki 35 orang atau 35% perempuan 17 atau 17%. Usia 18-30 sebanyak 33 orang atau 33%, 31-60 sebanyak 19 orang atau 19%. Karakteristik pendidikan SMP 3 orang atau 3%, SMA 35 orang atau 35%, S1 14 orang atau 14%, dengan karakteristik Pekerjaan Petani 9 orang atau 9% wiraswasta 5 orang atau 5% pedagang 4 orang atau 4% PNS 4 orang atau 4% dan lain-lain 30 orang atau 30%.

Pemahaman masyarakat Bangkalan dengan penilaian sangat baik sebanyak 33 orang atau 33%, dengan karakteristik laki-laki 20 orang atau 20% perempuan 13 atau 13%. Usia 18-30 sebanyak 21 orang atau 21%, 31-60 sebanyak 12 orang atau 12%. Karakteristik pendidikan SMP sebanyak 1 orang atau 1%, SMA 28 orang atau 28%, S1 4 orang atau 4%, dengan karakteristik

pekerjaan wiraswasta 2 orang atau 2%, pedagang 5 orang atau 5%, PNS 2 orang atau 2%, lain-lain 24 orang atau 24%.

Pemahaman masyarakat Bangkalan dengan penilaian Tidak Baik sebanyak 14 orang atau 14%, dengan karakteristik laki-laki 12 orang atau 12% perempuan 2 orang atau 2%. Usia 18-30 sebanyak 9 orang atau 9%, 31-60 sebanyak 5 orang atau 5%. Karakteristik pendidikan SMP 1 orang atau 1%, SMA 8 orang atau 8%, S1 5 orang atau 5%, dengan karakteristik Pekerjaan Petani 1 orang atau 1% wiraswasta 2 orang atau 2% pedagang 2 orang atau 2% PNS 1 orang atau 1% dan lain-lain 8 orang atau 8%.

Pemahaman masyarakat Bangkalan yang memberikan penilaian Sangat Tidak baik berjumlah 1 orang atau 1% dengan karakteristik Laki-laki usia 31-60, pendidikan S1, pekerjaan PNS

III. Penilaian masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran madura Sebagai Provinsi

Penilaian masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran madura sebagai provinsi dengan penilaian baik sebanyak 74 orang atau 74% dengan karakteristik laki-laki 52 orang atau 52% perempuan 22 atau 22%. Usia 18-30 sebanyak 48 orang atau 48%, 31-60 sebanyak 26 orang atau 26%. Karakteristik pendidikan SMP 4 orang atau 4%, SMA 53 orang atau 53%, S1 17 orang atau 17%, dengan karakteristik Pekerjaan Petani 7 orang atau 7% wiraswasta 4 orang atau 4% pedagang 7 orang atau 7%, PNS 4 orang atau 4% dan lain-lain 52 orang atau 52%.

Penilaian masyarakat Bangkalan dengan penilaian Tidak Baik sebanyak 16 orang atau 16%, dengan karakteristik laki-laki 12 orang atau 12% perempuan 4 atau 4%. Usia 18-30 sebanyak 10 orang atau 10%, 31-60 sebanyak 6 orang atau 6%. Karakteristik pendidikan SMP 1 orang atau 1%, SMA 10 orang atau 10%, S1 5 orang atau 5%, dengan karakteristik Pekerjaan Petani 3 orang atau 3% wiraswasta 2 orang atau 2% pedagang 1 orang atau 1% PNS 3 orang atau 3% dan lain-lain 7 orang atau 7%.

Penilaian masyarakat Bangkalan dengan penilaian Sangat Baik sebanyak 9 orang atau 9%, dengan karakteristik laki-laki 4 orang atau 4% perempuan 5 atau 5%. Usia 18-30 sebanyak 4 orang atau 9%, 31-60 sebanyak 5 orang atau 5%. Karakteristik pendidikan SMA 7 orang atau 7%, S1 2 orang atau 2%, dengan karakteristik Pekerjaan wiraswasta 2 orang atau 2% pedagang 4 orang atau 4% dan lain-lain 3 orang atau 3%.

Penilaian dengan Sangat tidak baik sebanyak 1 orang atau 1% dengan karakteristik perempuan usia 18-30, pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta.

B. SARAN

Skripsi ini jauh dari kata sempurna yang masih perlu dilakukan banyak perbaikan. adanya saran dan kritikan terhadap Skripsi juga masih sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Penulis berharap Skripsi dapat menjadikan wawasan bagi masyarakat Madura dalam proses pemekaran Madura sebagai Provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Paustaka Pelajar, 2010.

Hamka, Muhammad. *Hubungan antara Persepsi Terhadap Pengawasan Kerja dengan Motivasi Berprestasi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Fakultas Psikologi, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2002.

Hanif, Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo: Jakarta, 2007.

Haris, Syamsuddin, Ed. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Dearah*. Jakarta: LIPI Press, 2007.

HR, Syaukani. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Martodirjdo, Haryo S. *Pemahaman Lintas Budaya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Ed. Revisi 2. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Muchlis, Hamdi. *Naskah Akademik Tentang Pembentukan dan Penghapusan Daerah*. Jakarta: BPH, DEPKUMHAM RI, 2008.

Muhid, Abdul. *Analisis Statistik 5 Langkah Praktis Analisis Statistik Dengan SPSS For Windows* Sidoarjo: Zitama, 2012.

Nas, Jayadi. *Konflik Elit Di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal*.

Niel, Robert van. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.

Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.

R, Tarigan. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Rahmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Rozaki, Abdur. *Islam, Oligarki Politik, dan Perlawanan Sosial*. Cetakan, I. Yogyakarta: SUKA Press dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Saiffudin Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sihotang. *“Himpunan Undang-Undang Dasar, Undang- Undang, dan Peraturan Perundangan” Tentang Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Solichin, Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan, dari Formulasim ke Implementasi, Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 2002.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Al-Fabeta, 2012.

_____, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2012.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Al-Fabeta, 2010.

_____, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Sukarno, Makmuri. *Peneliti Pusat Kependudukan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*.

Suzanne, Keller. *Penguasa dan Kelompok Elit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Syafrizal, *Mengelola Dinamika Politik dan Sumber Daya Daerah (edisi ke-2), Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD)*. Yogyakarta: UGM, 2008.

Tjokroamidjojo, Bintoro. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Umur, Husein. *Metode penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.

Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*, 2004), Cet,4. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

_____. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Adi, 2002.

_____. *Psikologi Komunikasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

_____. *Psikologi Sosial: Persepsi Sosial*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2003.

Yuswanto, *Hukum Desentralisasi Keuangan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.

Sumber Internet:

BKKP, www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/66/1213.bpkp “Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. (Senin, 20 Maret 2017).

BPHN, http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_pemekaran.pdf “Pengkajian Hukum Tentang Pemekaran dan Penggabungan Daerah” (Selasa, 19 september 2017).

BPS, <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1366> (Selasa, 21 Maret 2017).

Detik, <https://news.detik.com/jawatimur/3313129/pulau-madura-akan-jadi-provinsi-yang-didukung-empat-bupati> Diakses pada tanggal 11 Agustus 2017 jam 23.21 WIB

<https://news.detik.com/jawatimur/3313129/pulau-madura-akan-jadi-provinsi-yang-didukung-empat-bupati> (Jum'at, 11 Agustus 2017).

I, Zamroni. *Dinamika Elite Lokal Madura. Jurnal Sosiologi Masyarakat*. 2012.

Jawa Pos Radar Madura, <http://radarmadura.jawapos.com/read/2016/10/05/4261/-kajian-provinsi-madura-bakal-digerojok-rp-200-juta> "Kajian Provinsi Madura" (Kamis, 17 November 2016).

Kabupaten Bangkalan, <http://www.bangkalankab.go.id/v4/>. "Profil Kabupaten Bangkalan" (Minggu, 04 Februari 2018).

Kemendagri, <http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/DaftarSPM/PP%20Nomer%2078%20Tahun%202007.pdf> "Otonomi Daerah" (Minggu, 13 Agustus 2017).

Kompas, <http://regional.kompas.com/read/2016/08/28/16260421/panitia.Provinsi.madura.minta.perlakuan.khusus> "Panitia Provinsi Madura Minta Perlakuan Khusus" (Senin, 12 Desember 2016).

KPUD Bangkalan, <http://kpu-bangkalankab.go.id/bkl/wp-content/uploads/2016/05/dpt-pilpres-2014-1.jpg> "Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bangkalan" (Rabu, 18 Januari 2017).

Lipi, <http://kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/pendidikan/241-dikhotomi-pendidikan-umum-versus-agama-dan-reproduksi-masyarakat-santri>. "Dikhotomi Pendidikan Umum Versus Agama dan Produksi Masyarakat Santri" (Minggu, 17 Desember 2017).

Mahkamah Konstitusi, http://www.google.com/url?q=https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/download/105/104&sa=U&ved=0ahUKewjlqZGsy9TVAhWKN08KHxfNC7kQFggkMAM&usg=AFQjCNFvHupXL_qz4PFkmiStV4OzZL4m0Q “Putusan MK” (Minggu, 13 Agustus 2017).

Media Madura, mediamadura.com/tag/potens-madura/ (Kamis, 30 Maret 2017).

Media Madura, newsmadura.com/bangkalan/.../madura-pulau-kecil-sejuta-potensi/ (Kamis, 30 Maret 2017).

Okezone, <https://economy.okezone.com/read/2015/11/16/320/1250360/madura-mau-jadi-provinsi-baru-punya-apa-saja> “Madura Mau Jadi Provinsi Baru” (Selasa, 19 September 2017).

Prasojo, Eko. “Jorjoran Pemekaran Daerah: Instrumen Kepentingan Ekonom Politik”. *Jurnal Spirit Publik*. Vol 1. No 7 Tahun 2011.

Pratikno. “Usulan Perubahan Kebijakan Penataan Daerah (Pemekaran dan Penggabungan Daerah)”. *Jurnal Spirit Publik* Vol 1. No. 7 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Butir 7.

UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemekaran Pasal 4 ayat (1). Kemudian, ayat (2).

Web Menuju Pembentukan Provinsi Madura, <http://provinsimadura.blogspot.co.id/2008/06/> “Madura Layak Jadi Provinsi” (Minggu, 10 September 2017).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Paustaka Pelajar, 2010.

Hamka, Muhammad. *Hubungan antara Persepsi Terhadap Pengawasan Kerja dengan Motivasi Berprestasi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Fakultas Psikologi, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2002.

Hanif, Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo: Jakarta, 2007.

Haris, Syamsuddin, Ed. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Dearah*. Jakarta: LIPI Press, 2007.

HR, Syaukani. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Martodirjdo, Haryo S. *Pemahaman Lintas Budaya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Ed. Revisi 2. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Muchlis, Hamdi. *Naskah Akademik Tentang Pembentukan dan Penghapusan Daerah*. Jakarta: BPH, DEPKUMHAM RI, 2008.

Muhid, Abdul. *Analisis Statistik 5 Langkah Praktis Analisis Statistik Dengan SPSS For Windows* Sidoarjo: Zitama, 2012.

Nas, Jayadi. *Konflik Elit Di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal*.

Niel, Robert van. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.

Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* Jakarta: Kencana, 2011.

R, Tarigan. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Rahmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Rozaki, Abdur. *Islam, Oligarki Politik, dan Perlawanan Sosial*. Cetakan, I. Yogyakarta: SUKA Press dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Saiffudin Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sihotang. *“Himpunan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Peraturan Perundangan” Tentang Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Solichin, Abdul Wahab. *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasim ke Implementasi, Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 2002.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Al-Fabeta, 2012.

_____, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2012.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Al-Fabeta, 2010.

_____, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Sukarno, Makmuri. *Peneliti Pusat Kependudukan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*.

Suzanne, Keller. *Penguasa dan Kelompok Elit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Syafrizal, *Mengelola Dinamika Politik dan Sumber Daya Daerah (edisi ke-2), Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD)*. Yogyakarta: UGM, 2008.

Tjokroamidjojo, Bintoro. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Umur, Husein. *Metode penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.

Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*, 2004), Cet,4. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

_____ *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Adi, 2002.

_____ *Psikologi Komunikasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

_____ *Psikologi Sosial: Persepsi Sosial*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2003.

Yuswanto, *Hukum Desentralisasi Keuangan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.

Sumber Internet:

BKKP, www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/66/1213.bpkp "Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. (Senin, 20 Maret 2017).

BPHN, http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_pemekaran.pdf "Pengkajian Hukum Tentang Pemekaran dan Penggabungan Daerah" (Selasa, 19 september 2017).

BPS, <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1366> (Selasa, 21 Maret 2017).

Detik, <https://news.detik.com/jawatimur/3313129/pulau-madura-akan-jadi-provinsi-yang-didukung-empat-bupati> Diakses pada tanggal 11 Agustus 2017 jam 23.21 WIB

<https://news.detik.com/jawatimur/3313129/pulau-madura-akan-jadi-provinsi-yang-didukung-empat-bupati> (Jum'at, 11 Agustus 2017).

I, Zamroni. *Dinamika Elite Lokal Madura. Jurnal Sosiologi Masyarakat*. 2012.

Jawa Pos Radar Madura, <http://radarmadura.jawapos.com/read/2016/10/05/4261/-kajian-provinsi-madura-bakal-digerojok-rp-200-juta> “Kajian Provinsi Madura” (Kamis, 17 November 2016).

Kabupaten Bangkalan, <http://www.bangkalankab.go.id/v4/>. “Profil Kabupaten Bangkalan” (Minggu, 04 Februari 2018).

Kemendagri, <http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/DaftarSPM/PP%20Nomer%2078%20Tahun%202007.pdf> “Otonomi Daerah” (Minggu, 13 Agustus 2017).

Kompas, <http://regional.kompas.com/read/2016/08/28/16260421/panitia.Provinsi.madura.minta.perlakuan.khusus> “Panitia Provinsi Madura Minta Perlakuan Khusus” (Senin, 12 Desember 2016).

KPUD Bangkalan, <http://kpu-bangkalankab.go.id/bkl/wp-content/uploads/2016/05/dpt-pilpres-2014-1.jpg> “Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bangkalan” (Rabu, 18 Januari 2017).

Lipi, <http://kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/pendidikan/241-dikhotomi-pendidikan-umum-versus-agama-dan-reproduksi-masyarakat-santri>. “Dikhotomi Pendidikan Umum Versus Agama dan Produksi Masyarakat Santri” (Minggu, 17 Desember 2017).

Mahkamah Konstitusi, http://www.google.com/url?q=https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/download/105/104&sa=U&ved=0ahUKEwjLqZGsy9TVAhWKN08KHxfNC7kQFggkMAM&usq=AFQjCNFvHupXL_qz4PFkmiStV4OzZL4m0Q “Putusan MK” (Minggu, 13 Agustus 2017).

Media Madura, mediamadura.com/tag/potens-madura/ (Kamis, 30 Maret 2017).

Media Madura, newsmadura.com/bangkalan/.../madura-pulau-kecil-sejuta-potensi/ (Kamis, 30 Maret 2017).

Okezone, <https://economy.okezone.com/read/2015/11/16/320/1250360/madura-mau-jadi-provinsi-baru-punya-apa-saja> “Madura Mau Jadi Provinsi Baru” (Selasa, 19 September 2017).

Prasojo, Eko. “Jorjoran Pemekaran Daerah: Instrumen Kepentingan Ekonom Politik”. *Jurnal Spirit Publik*. Vol 1. No 7 Tahun 2011.

Pratikno. “Usulan Perubahan Kebijakan Penataan Daerah (Pemekaran dan Penggabungan Daerah)”. *Jurnal Spirit Publik* Vol 1. No. 7 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Butir 7.

UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemekaran Pasal 4 ayat (1). Kemudian, ayat (2).

Web Menuju Pembentukan Provinsi Madura, <http://provinsimadura.blogspot.co.id/2008/06/ Madura Layak Jadi Provinsi>” (Minggu, 10 September 2017).